MODUL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

O
L
E
H

DRS. BADRUDDIN NASIR, M.Si
NIP. 196412311993031022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Modul : Pembangunan Kawasan Perbatasan

2. Penyusun
   a. Nama : Drs. Badruddin Nasir, M.Si
   b. NIP : 196412311993031022
   c. Pangkat/Gol : Pembina Tingkat 1/ IV.C
   d. Jabatan : Lektor Kepala
   e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
   f. Prodi : Sosiatri

Samarinda, 04 September 2018

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H.Muhammad Noor, M.Si
NIP. 196008171986 1001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan 3

BAB II TEORI & KONSEP 5

A. Kesejahteraan Sosial 7
B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial 10
C. Pembangunan Nasional 12
D. Fokus Pembanguna Kesejahteraan Sosial 15
E. Pendekatan 17
F. Isu-isu Pembangunan Kesejahteraan Sosial 24

BAB III PEMBAHASAN 28

A. Gambaran Umum Kabupaten Pengunungan Bintang 28
B. Kondisi Perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang-Papua Nugini 29
C. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang 31
D. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang 36
E. Potensi Kabupaten Pegunungan Bintang 47
F. Fokus Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 53

BAB IV PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90
B. Rekomendasi 91

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Papua adalah pulau terbesar yang dimiliki Indonesia, dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Papua juga dikenal sebagai penghasil tambang emas terbesar di dunia, demikian juga dengan kekayaan alam lainnya, seperti tambang minyak, batubara, hutan, kekayaan laut, dan panorama alam Namun ironisnya, provinsi ini masih menjadi salah satu yang termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang banyak terjadi di daerah pelosok dan daerah perbatasan. Permasalahan tersebut semakin kompleks mengingat bentangan kawasan perbatasan di provinsi ini sangat luas dan tipologinya bervariasi.

Pengelolaan perbatasan di Papua belum sepenuhnya pula menjalankan pengelolaan yang berbasis pada pengelolaan "manusianya." Hal ini dikarenakan masih dominannya pembuatan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan yang berbasis pada kepentingan pemerintah. Layaknya kawasan perbatasan dengan negara lain di Indonesia, kendala umum yang dihadapi oleh Papua adalah kesenjangan pembangunan dengan ciri-ciri: masih rendahnya aksesibilitas, terbatasnya sarana dan prasarana, kepadatan penduduk relatif rendah, rendahnya kualitas SDM, dan belum optimalnya pembangunan. Penduduk di kawasan perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan minimnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Terkait dengan kenyataan sosial bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Papua sejatinya masih memiliki kesatuan adat dan budaya, maka faktor nilai dan norma adat biasanya lebih kuat dibandingkan norma dan ikatan nasional. Ini tentu dapat menjadi masalah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Peran civil society, akademisi dan lainnya belum menunjukkan kontribusi yang baik. Persoalannya terletak pada ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat. Sementara itu program-program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing daerah di Papua dari pemerintah pusat, daerah dan BUMN belum optimal. Ini dikarenakan tingginya ego-sektoral dan lemahnya koordinasiantar instansi, di mana mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga dampak program justru nyaris tidak terdengar. Keterlibatan dari sektor swasta dalam mengembangkan wilayah perbatasan juga masih minim sehingga membuat perkembangan kawasan perbatasan tidak cepat dan teratur.

Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi. politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional (Tannas) khususnya di wilayah perbatasan diperlukan pembangunan nasional dengan pemberdayaan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya secara optimal baik pusat maupun daerah dan tetap memperhatikan nuansa otonomi daerah guna mendorong pembangunan daerah perbatasaan secara terencana, terarah, menyeluruh dan terpadu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Makalah ini dimulai dari Bab I yang membahas latar belakang masalah. rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah, dilanjutkan Bab II tentang teori yang berkaitan dengan pembangunan. Pada Bab III membahas kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang Papua beserta upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun kabupaten tersebut. sedangkan pada Bab V yang merupakan akhir dari naskah ini berisi kesimpulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum Kabupaten Pegunungan Bintang?
2. Bagaimana kondisi perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Nugini?
3. Apa saja permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang?
4. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang?
5. Apa sajakah potensi yang ada Kabupaten Pegunungan Bintang?
6. Apa sajakah Fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Untuk mengetahui kondisi perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang - Papua Nugini.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang.
4. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Untuk mengetahui potensi yang ada Kabupaten Pegunungan Bintang.

6. Untuk mengetahui Fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

BAB II

TEORI & KONSEP

Selama ini telah banyak alur pikir, aneka ragam model dan paradigma pembangunan yang telah dipakai di Tanah Papua, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah perbaikan yang lebih maju, tetapi tidak maju-maju juga. Berbagai ukuran dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya dan politik. Tetapi sesungguhnya model terapan tersebut merupakan terjemahan dari ancangan suatu pola dan konsep anutan kebijakan pembangunan. Kini, dengan semakin menguatnya keinginan memandirikan daerah dalam konteks otonomi, mengharuskan adanya adaptasi model dan paradigma pembangunan yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi, menggeser paradigma lama yang terbukti tidak memberi garansi memuaskan Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang berlangsung secara seimbang antara perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan penyikapan yang arif bukan menurut penguasa saja, melainkan masyarakat pun patut diajak bicara.

Sejarah pembangunan daerah di Tanah Papua dalam kurun waktu 30-an tahun lebih dipengaruhi oleh paradigma pertumbuhan yang sentralistis ketimbang paradigma kesejahteraan yang memihak rakyat. Munculnya gugatan terhadap keabsahan paradigma pertumbuhan akhir-akhir ini terutama dalam membangun masyarakat secara materil, karena dilatari munculnya banyak fenomena yang menimbulkan berbagai masalah. Salah satu aspeknya adalah ketika pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan yang

mengedepankan prinsip trickle down effect dan spread effect, ternyata telah menghasilkan konglomerasi di satu pihak dan kemiskinan di pihak lain. Sementara itu, ketika pembangunan diidentikkan dengan modernisasi, menimbulkan pola-pola pengembangan yang cenderung bersifat memaksa dan berimplikasi pada tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi. Akibatnya, banyak nilai-nilai tradisional yang memiliki potensi riil untuk mendorong pengembangan masyarakat menjadi teralienasi dan kehilangan daya rekatnya. Sesungguhnya, konsepsi pembangunan tersebut tidaklah sebatas pertumbuhan atau modernisasi dengan parameter ekonomi serta kemajuan fisik dan material semata, melainkan lebih dari itu diperlukan aspek-aspek non material yang mencakup pembentukan dan pengembangan keseluruhan sikap sikap sosial dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan, paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (security approach) daripada pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) mulai berubah. Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) telah menetapkan arah pengembanganwilayah perbatasan negara yaitu "dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking', menjadi 'outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga". Berdasarkan UU tersebut, di samping pendekatan keamanan. upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Di samping itu, perhatian khususdiarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di

perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. Oleh karena itu, dapat dirumuskan pendekatan pembangunan dengan konsep kesejahteraan sosial, yang dapat digunakan sebagai kerangka teoritis maupun kerangka praktis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, baik dalam konteks pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

A. Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional (Suharto, 1997) PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atao bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya. merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

"Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan

kebutuhan kebutuhan jasmaniah rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sexual dengan Pancasila

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004). Sehingga kalau mau jujur, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham "Negara Kesejahteraan" (welfare state) dengan model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (social security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat,

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahters yakni terpenuhinya kebutuhan kebutihan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arcoa atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagal profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan fend) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atmu pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2004).

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups) Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yangbersifatformal adalah berbagai skema jaminan sosial (social security) yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (social assistance) dan asuransi sosial (social Insurance), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (social benefits atau doll) tunjangan pengangguran (unemployment benefits). tunjangan

keluarga (family assistance yang di Amerika dikenal dengan nama TANF stan Temporary Assisstance for Needy Families). Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial social safety neas) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro. UKS ini pada intinya menunjuk pada apa yang di. Tanah Air dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Perlu dijelaskan di sini haliwa konsep mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas di Indonesia. Di negara-nega lain, seperti di AS. Selandia Baru, Inggris atau Australia, konsep mengenai social welfare development kurang dikenal. Dalam benak publik di negara-negara tersebut, istilah welfare (kesejahteraan) sudah mencakup makna UKS atau PKS.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial. serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan PKS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompokkelompok

masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Ciri utama PKS adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yan diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun. prioritas utama PKS adalah kelompokkelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah (child abuse), pasangan yang mengalami perlakuan salah (spouse abuse), anak yang di perdagangkan atau dilacurkan. komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

C. Pembangunan Nasional

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah negara-bangsa (nation-state), yakni pertumbuhan ekonomi (economi growth), perawatan masyarakat (community care) dan pengembangan manusia (human development). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan "wirausaha" (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang.

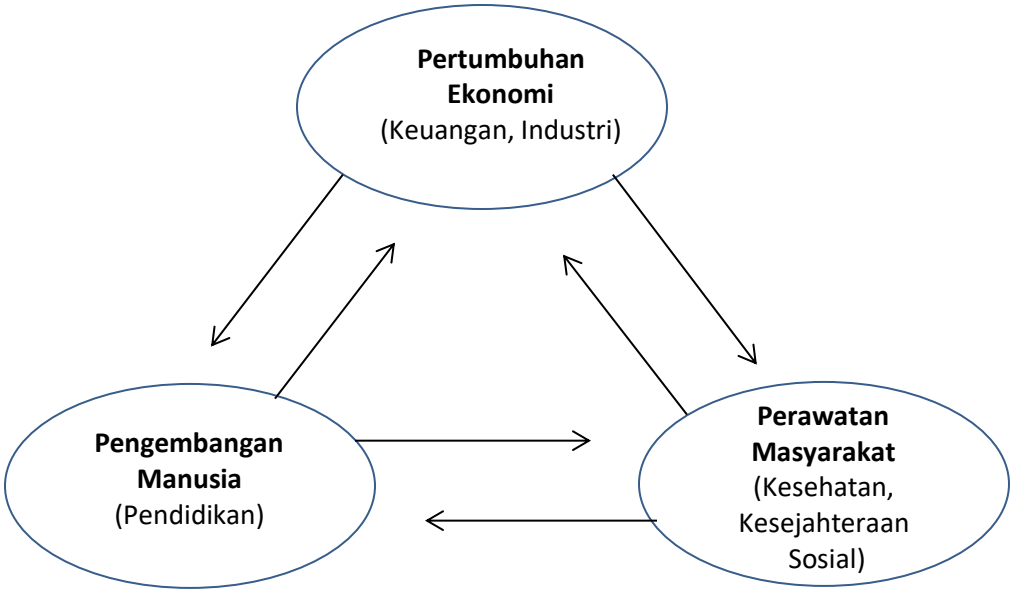

Gambar 1.1 Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional

Sebagaimana dilustrasikan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Apabila pertumbuhan ekonomi dibaratkan kepala dalam tubuh man usia, maka perawatan masyarakat (sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial), bersama pengembangan manusia (sektor pendidikan), merupakan kaki yang menopang kepala itu

Fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan man usia inilah yang sebenarnya merupakan substansi dari pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi. Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa tegara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial Suharto, 2004). Laporan tahunan UNDP, Human Development Report, yang kini menjadi acuan di berbagai negara di dunia, secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertation lama (tidak berkelanjutan). Ini sejalan dengan ternuan pakar ekonomi pemenang.

Nobel 1998, Amartya Sen. Sen dengan sempurna membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial tidaklah otomatis. Agar berjalan

positif dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus ditunjang oleh kebijakan sosial (social policy) pemerintah yang pro pembangunan sosial (Suharto, 2005)

Ketiga fungsi negara-bangsa di atas juga sering dijadikan dasar dalam menyusun portofolio departemen/kementerian negara dan lembaga pemerintahan Di hampir semua negara di dunia, struktur pemerintahan selalu memiliki lembaga-lembaga yang mencakup sedikitnya ketiga fungsi negara-bangsa ini, Misalnya, untuk menjalankan fungsi pertumbuhan ekonomi dibentuk Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Sementara itu, untuk menjalankan fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia, dibentuk Departemen Kesehatan. Departemen Kesejahteraan Sosial, dan Departemen Pendidikan.

Dalam struktur pemerintahan di Tanah Air, lembaga pemerintah yang berperan dominan dalam PKS adalah Departemen Sosial, sebagaimana Departemen Kesehatan lebih dominan dalam pembangunan kesehatan. Departemen Pendidikan Nasional dalam pembangunan pendidikan, dan Departemen Agama dalam pembangunan agama. Keempat departemen di atas berada di bawah payung dan kendali langsung Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian, karena arti kesejahteraan rakyat di sini mengacu pada konsep pembangunan sosial yang mencakup arti luas dan meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan agama, maka daiam arti sempit, Departemen Sosial sesungguhnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial. Bersama departemen-departemen lain, ia terlibat dalam pembangunan sosial, namun konsentrasinya secara khusus melaksanakan PKS (Gambar 1.2).

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep welfare pluralism di atas, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam PKS. Masyarakat juga terlibat dalam PKS, baik dalam

pelaksanaan berbagai program maupun pendanaannya. Lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan PKS adalah masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui organisasi-organisasi sosial (Orsos) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang UKS dalam skala lokal, nasional maupun internasional, seperti lembaga sosial lokal (Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Save the Children World Vision, dan lain-lain.

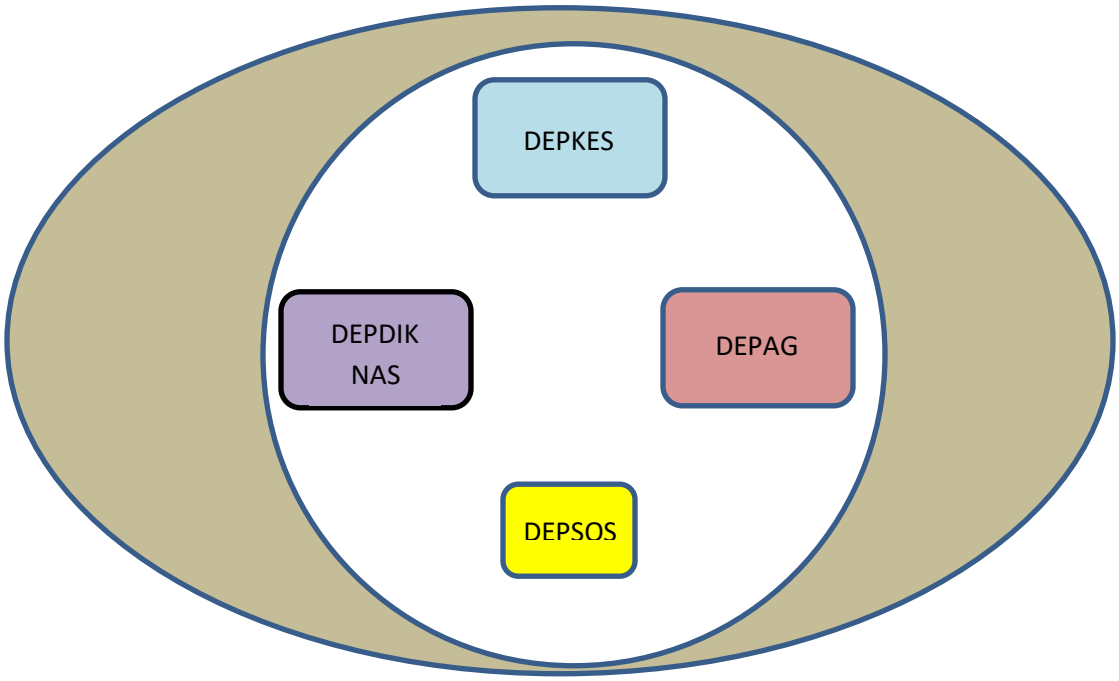

Gambar 1.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional

D. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Banyak arti yang diberikan pada istilah PKS (Suharto, 2005b). Karenanya, tidak mudah merumuskan fokus PKS secara tegas. PKS seringkali menyentuh, berkaitan, atau bahkan, selintas, bertumpang-tindih (over/aping) dengan bidang lain yang umumnya

dikategorikan sebagai pembangunan sosial, semisal kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih dari itu, makna sosial tidak jarang diartikan secara luas sebagai, misalnya, kegiatan kesukarelawanan, hiburan, rekreasi, sesuatu yang bersifat non-fisik atau non-ekonomi.

Merujuk pada definisi welfare dari Howard Jones (1990), tujuan utama PKS yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. Makna "kemiskinan dalam berbagai manifestasinya" menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya menunjuk pada "kemiskinan fisik", seperti rendahnya pendapatan (income poverty) atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosiallain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemisan, pekerja migran, termasuk di dalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Penjelasan Spicker (1995:5) mengenai konsep welfare juga membantubantu mempertegas substansi PKS dengan menyatakan bahwa welfare (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai "well-being" atau "kondisi sejahtera". Namun, welfare juga berarti The provision of social services provided by the state' dan sebagai Certain types of benefits, especially means-tested social security, aimed at poor people. Artinya, PKS menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Seperti halnya pengalaman di negara lain, maka PKS memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu pelayanan sosial (social services provisions). perlindungan sosial (social protection), dan

pemberdayaan masyarakat (community/social empowerment) Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan (Gambar 1.3)

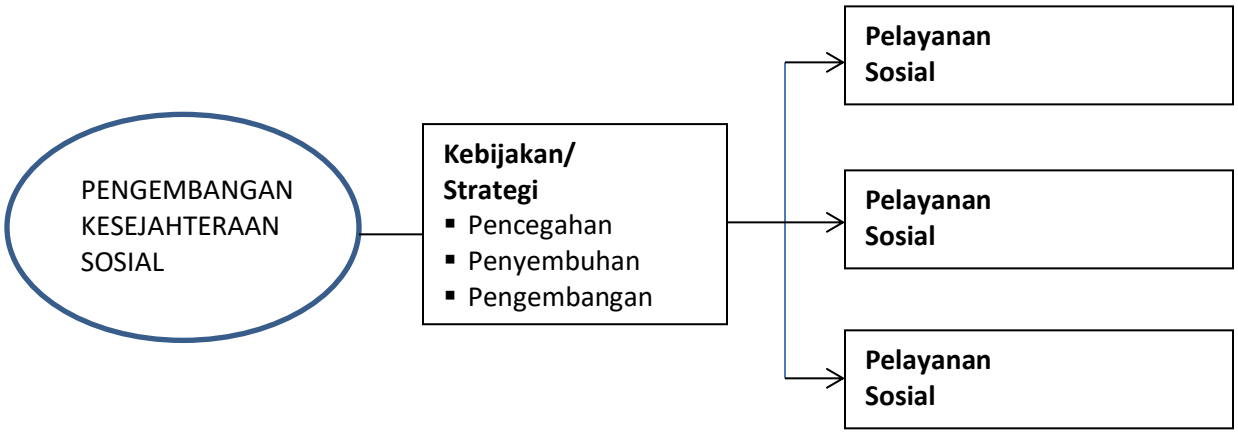

Gambar 1.3 Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

E. Pendekatan

Mengacu pada buku Charles Zastrow (2000), Introduction to Social Work and Social Welfare, ada tiga pendekatan dalam PKS, yaitu perspektif residual institusional, dan pengembangan. Ketiga perspektif tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk model welfare state (negara kesejahteraan) yang merupakan basis pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pemberantasan kemiskinan di negara-negara demokratis.

a) Pendekatan Residual

Pandangan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar. Bantuan

finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek. pada masa kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali.

Perspektif residual sangat clipengaruhi ideologi konservatif (berasal dari kata kerja "to comerve", "memelihara" atau "mempertahankan") yang cenderung menolak perubahan (Parsons et al. 1994; Zastrow, 2000). Menurut ideologi ini tradisi dan kepercayaan yang berubah cepat akan menghasilkan dampak negatif, ketimbang positif. Dalarn konteks ekonomi, penganut konservatif melihat bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap bekerjanya pasar. Daripada mengatur bisnis dan industri. pemerintah lebih baik mendukungnya melalui pemberian insentif pajak Ekonomi pasar bebas adalah cara paling baik untuk menjamin kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan individu. Welfare state yang berwajah rudimentary selektivitas dan melibatkan pendekatan means-tested kemudian diyakini oleh para residualist sebagai model yang tepat dijalankan dalam sistem kesejahteraan sosial suatu negara (lihat Spieker, 1995; Suharto, 2005)

Perspektif residual sering disebut sebagai pendekatan yang "menyalahkan korban atau blaming the victim approach. Masalah sosial, termasuk kemiskinan, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggungjawab dirinya, bukan sistem sosial. Metode pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah sosial melibatkan pendekatan klinis dan pelayanan langsung yang ditujukan untuk membantu orang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Program-program pengentasan kemiskinan yang bergaya jaring Pengaman Sosial (JPS) atau subsidi BBM adalah "anak kandung" faham residual. Penerima pelayanan sosial dianggap sebagai klien, pasien, orang yang

tidak mampu menyesuaikan diri atau bahkan penyimpang (deviant) (Parsons et al. 1994)

b) Pendekatan Institusional

Berbeda dengan perspektif residual yang memandang pelayanan sosial sebagai charity for unfortunates pendekatan institusional melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern. Pelayanan sosial dipandang sebagai hak warga negara.

Perspektif institusional dipengaruhi oleh ideologi liberal yang percaya bahwa perubahan pada umumnya adalah baik dan senantiasa membawa kemajuan (Parsons et al. 1994; Zastrow, 2000). Masyarakat dan ekonomi pasar memerlukan pengaturan guna menjamin kompetisi yang adil dan setara di antara berbagai kepentingan Karena negara dipandang merefleksikan kepentingan kepentingan warganya melalui perwakilan-perwakilan kelompok, maka pemerintah dibenarkan untuk mengatur dan memberikan pelayanan sosial. Perspektif ini sangat mendukung model welfare state yang bersifat universal Program-program pemerintah, termasuk program kesejahteraan sosial dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan secara luas dan berkelanjutan Menariknya, sikap seperti ini justru berbeda dengan paham para ekonom pemuja neo-liberalisme yang cenderung mendukung pasar bebas globalisasi, dan laissez-faire policy sebagaimana dianut para politisi dari kalangan konservatis.

Selain dipengaruhi ideologi liberal, perspektif institusional juga dekat dengan ideologi radikal. Dalam konteks ini, perspektif institusional termasuk dalam gugus pendekatan "yang menyalahkan sistem" (blaming the system approach) (Parsons, et al, 1994) Individu dan kelompok dipandang sebagai warga negara yang sehat, aktif dan partisipatif. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kesalahan individu. Melainkan, produk

dari sistem sosial yang tidak adil, menindas, sexist dan rasis yang kemudian membentuk sistem kapitalis. Metode pekerjaan sosial yang sering digunakan mencakup program-program pencegahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan strukturstruktur kesempatan. Tiga bentuk program pemerintah yang umum ditekankan oleh pendekatan institusional meliputi: penciptaan distribusi pendapatan; stabilisasi mekanisme pasar swasta dan penyediaan "barang-barang publik" tertentu (pendidikan, kesehatan, peru mahan sosial, rekreasi), yang tidak dapat disediakan oleh pasar secara efisien (Parsons et al, 1994).

c) Pendekatan Pengembangan

Selama bertahun-tahun telah terjadi perdebatan seru antara penganut ideologi liberal/institusional dengan penganut ideologi konservatif/residual. Kaum institusional mengkritik pendekatan residual sebagai perspektif kesejahteraan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kewajiban negara (state obligation) Negara wajib menyediakan bantuan jangka panjang dan terstruktur kepada konstituen mereka, terutama kelompok lemah, miskin dan kurang beruntung (disadvantegd groups) yang tidak mampumemenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan adekuat. Skema bantuan sosial residual yang mensyaratkan tes penghasilan (means-tested approach) dikritik sebagai sistem kesejahteraan sosial yang melahirkan stigma dan poverty trap kepada para penerimanya.

Skema pelayanan sosial means-tested umumnya hanya diberikan kepada orang miskin yang memiliki pendapatan tertentu atau di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Misalkan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp. 100.000 per bulan. Maka hanya orang yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan itulah yang berhak menerima pelayanan sosial. Akibatnya, skema ini menimbulkan stigma. karena penerima

pelayanan sosial selalu diidentikan dengan orang miskin dan tidak mampu. Apabila orang tersebut suatu ketika mendapat pekerjaan dengan upah, katakanlah Rp.110.000 per bulan, secara otomatis dia harus melepaskan bantuan sosial yang diterimanya. Kondisi ini sering memaksa para penerima pelayanan untuk tetap tidak bekerja, terutama jika upahnya hanya lebih sedikit dari standar kemiskinan. Situasi seperti inilah yang kemudian disebut sebagai "jebakan kemiskinan", karena orang miskin terpaksa atau dipaksa untuk terus hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebaliknya, kelompok residual juga tidak henti-hentinya mengkritik pendekatan institusional. Pendekatan ini dipandangtelah melahirkan model welfare state yang boros, tidak ekonomis dan menciptakan ketergantungan kepada pemerintah yang berkuasa. Para penerima pelayanan sosial menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja agar dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi pembangunan sosial yang diajukan Midgley (1995) dalam buku Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare (1995) menawarkan pendekatan alternatif, yakni perspektif pengembangan (developmental perspective) yang memadukan aspek-aspek positif dari pendekatan residual maupun institusional (Zastrow, 2000).

Perspektif pengembangan sejalan dengan ideologi liberal dan pendekatan institusional. Ia mendukung pengembangan program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta peiibatan tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Menurut Midgley (2005: 205):

Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial pemerintah juga seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial lewat bermacam kebijakan dan program sektor publik. Perspektif institusional membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi dari berbagai pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasikan pada tingkat nasional. Mereka juga mempekerjakan tenaga spesialis yangtelah terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial.

Pendekatan pengembangan juga tidak menentang ideologi konservatif dan pendekatan residual, karena menyatakan bahwa pengembangan program-program kesejahteraan sosial tertentu akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi (di AS, politisi aliran konservatif umumnya menolak program-program kesejahteraan sosial karena dipandang akan membawa dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi) (Zastrow, 2000:15). Lni sejalan dengan ide Tittmus (1974), "Mbalnya kebijakan sosial dan pekerjaan sosial Inggris, yang berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah "the handmaiden of the process of production" Agar terus hidup dan berjaya, masyarakat harus memiliki beberapa piranti untuk memelihara keteraturan, mempertahankan perubahan, menciptakan angkata:1 kerja yang kuat dan terampil, serta mereproduksi dirinya sendiri untuk masa depan Sistem kesejahteraan sosial memiliki fungsi untuk mempromosikan investasi sosial semacam ini (Spicker, 1988; 1995). Menurut Costa Esping-Andersen, kebijakan sosial di Swedia telah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja dan tidak hanya sekadar merespon kebutuhan sosial (Midgley, 1995).

Dalam buku sebelumnya, The Social Dimensions of Development Social Policy and Planning in the Third World Hardiman dan Midgley (1982) berpendapat bahwa penanganan masalah sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih difokuskan kepada kemiskinan, karena merupakan masalah dominan dan mempengaruhi permasalahan sosial lainnya. Namun, mengingat kemiskinan di negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara industri maju, maka strategi yang digunakan di negara maju tidak dapat begitu saja diadopsi negara berkembang Oleh karena itu, selain menyatukan dun perspektif dan ideologi kesejahteraan sosial yang tadinya berlawanan, perspektif pengembangan juga muncul sebagai reaksi terhadap tiga strategi peningkatan kesejahteraan sosial, yakni filantropi sosial, pekerjaan sosial dan administrasi sosial, yang dianggap Midgley terlalu didominasi oleh pendekatan residual dan program-program sosial yang bersifat remedial dan kuratif.

Metode pekerjaan sosial yang bermatra klinis, yang seringkali digunakan para pekerja sosial di negara-negara maju, dipandang Midgley kurang tepat jika digunakan dalam menangani kemiskinan. Sebagai ilustrasi, kemiskinan di AS banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat individual, seperti kesehatan yang buruk, kecacatan fisik, kecacatan mental, masalah emosional, alkoholisme. penyalahgunaan narkoba (Zastrow, 2000) dan karenanya cocok jika ditangani dengan metode casework atau terapi individu dan konseling. Sedangkan kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural, semisal KKN (Korupsi, Kolusi. Nepotisme) atau sistem pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang kurang memadai. Midgley mengusulkan bahwa selain memerlukan program-program penguatan sosial dan ekonomi dalam skala masyarakat.

penanggulangan kemiskinan perlu pula didukung oleh kebijakan ekonomi dan sosial pada skala nasional (Hardiman dan Midgley, 1982: Midgley, 1995; lihat Suharto, 2005b).

F. Isu-isu Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Di negara-negara yang kapitalis dan bahkan atheis sekalipun, selalu ada perlindungan sosial dari pemerintah untuk mencegah kaum lemah terpinggirkan oleh derap modernisasi dan industrialisasi. Di Indonesia, selain PKS diamanatkan secara tegas oleh konstitusi, jumlah PMKS masih sangat besar. Mereka umumnya merupakan "kelompok termiskin dari yang miskin" (the poorest of the poor)

a) Lemahnya Visi

Meskipun demikian, terdapat kesan kuat bahwa para politisi dan pembuat keputusan di Indonesia masih belum memiliki visi PKS yang tegas. Sebagai contoh, anggaran pemerintah untuk PKS masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan sosial lainnya. Pertanyaannya, mengapa para politisi dan pembuat kebijakan di Indonesia tidak memiliki visi yang jelas mengenai PKS? Jika dipetakan, sedikitnya ada tiga isu yang menjelaskan kondisi

Pertama, pandangan mengenai pentingnya PKS seringkali terjegal oleh mainstream pemikiran ekonomi yang kapitalistik. Indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan GNP. investasi, dan perluasan kesempatan kerja dijadikan parameter utama dan citra keberhasilan pembangunan. Kondisi sejahtera kemudian direduksi menjadi sekadar kemakmuran ekonomi. Kesejahteraan dianggap akan tercipta dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi mungkin. Mekanisme pasar bebas dan trickle down effect" diyakini sebagai "tangan-tangan tidak kelihatan yang akan mengatur beroperasinya pembangunan nasional secara optimal, meskipun kenyataannya

tidak terbukti. Pada saat pemerintahan Jokowi baru terbentok, para ekonom dan pemikir kapitalisme "buru-buru mengangkat isu bahwa pemerintah harus ramah pasar Padahal yang tepat, pasarlah yang harus ramah pemerintah. Terlebih, pasar harus ramah rakyat

Kedua, komitmen terhadap pembangunan seringkali masih bersifat jangka pendek berdasarkan kalkulasi ekonomi sederhana. Kegiatan pembangunan hanya dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap APBN. Artinya, jika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sebesar satu miliar, maka pemerintah harus memperoleh return yang lebih besar dari satu miliar. Karena Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara dalam waktu singkat, maka tidak mengherankan kalau sebagian besar penguasa ogah-ogahan mengurusi alah ini. Sayangnya, pandangan seperti ini telah merasuk pula ke para politisi dan pembuat keputusan di daerah. Dengan otonomi daerah, kini semakin banyak Pemda yang mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun, kurang bersemangat mengatasi "PAD" (Permasalahan Asli Daerah). Dana Pemda untuk PKS sebagian besar banyak yang mengandalkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi. Pengelolaan ekonomi "rabun jauh (miopia) seperti ini mirip dengan ekonomi "kaki lima" yang sederhana. Pagi hari pergi ke pasar membawa dagangan senilai Rp. 100.000, sore hari pulang ke rumah dengan membawa uang Rp.150.000. Padahal mengelola negara lebih kompleks, memerlukan wawasan yang lebih luas dan berpandangan ke depan. Investasi tidak mesti dalam bentuk ekonomi jangka pendek, melainkan pula investasi sosial jangka panjang.

Ketiga, PMKS yang menjadi sasaran utama PKS adalah kelompok masyarakat yang memiliki bargaining position yang rendah. Mereka tidak memiliki sumber dan akses

yang dapat menyuarakan aspirasi politiknya. Walhasil, meskipun kitab suci, ajaran moral dan UU menekankan pentingnya pembelaan terhadap mereka, para penguasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok kuat yang memililiki uang dan jaringan. Terlebih di negeri yang penuh dengan KKN. para penguasa lebih berminat berhubungan dengan orang yang memiliki uang melimpah guna menjalin deal-deal, yang saling menguntungkan.

b) Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pertanyaannya, apa saja yang perlu dilakukan agar PKS memenuhi kriteria strategis di atas? Sedikitnya ada tiga agenda besar yang perlu dilakukan.

Pertama, tugas PKS perlu direkonstruksi atau diluruskan kembali reunding) agar lebih jelas dan terukur. Sebagai langkah awal, reformulasi visi PKS merupakan keharusan. Sejalan dengan tiga fokus PKS, yakni pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, visi PKS dapat mengacu pada tiga kegiatan pokok tersebut, katakanlah, menjadi "melayani melindungi dan memberdayakan masyarakat. Dengan visi ini, PKS dapat merumuskan core business-nya secara terukur sehingga memiliki "merek dagang" (trade-mark) yang mudah dikenal oleh masyarakat luas.

Kedua, mengarusutamakan disiplin dan profesi pekerjaan sosial ke dalam kebijakan dan program PKS. Seperti halnya profesi keguruan yang menjadi tuan rumah di bidang pendidikan atau profesi kedokteran di bidang kesehatan, maka PKS perlu pula menetapkan pekerjaan sosial sebagai tuan rumah dan basis profesionalisme yang menerangi setiap konsep dan strateginya. Sebagian besar kebijakan dan program PKS belum didasari oleh konsep-konsep pekerjaan sosial. Melainkan hanya begitu saja dicomot dari ilmu-ilmu sosiallain yang seringkali kurang relevan. Sejalan dengan ini.

PKS perlu mengedepankan pekerja sosial profesional sebagai profesi utama di bidang kesejahteraan sosial. Seperti guru dan dokter, para pekerja sosial profesional ini adalah lulusan perguruan tinggi jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial yang dihasilkan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, serta perguruan tinggi negeri dan swasta lain yang tersebar di Indonesia. Tanpa ada kejelasan profesionalisme seperti ini, PKS akan terus-menerus dipandang sebagai lembaga "biasa-biasa saja yang kegiatannya dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja

Ketiga, agar tidak sekadar dipandang sebagai sektor pembangunan yang hanya menangani "sampah sosial" atau "piring kotor, PKS tidak hanya terpsest pada kegiatan rowing (mendayung) dalam "perahu" pembangunan nasional, melainkan harus pula terlibat dalam aktivitas steering" (menyetir) "persha pembangunan nasional, dalam bentuk perumusan kebijakan sosial di tingkat mak PKS perlu menggeser sasaran tembaknya dari sekadar menangani problema sosial di tingkat hilir menjadi menangani problema sosial di tingkat hulu. Misalnya, lembaga-lembaga yang bergerak bidang PKS seperti Depsos dapat memulainya dengan menjadi lembaga audit sosial yang bertugas memberi peringatan dini kepada lembaga lain yang memproduksi kebijakan dan program yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup dapat memberi alarm soal polusi dan kerusakan lingkungan, maka Depsos juga harus mampu merancang parameter yang mampu memberi peringatan dini soal"polusi sosial" dan "kerusakan sosial" akibat kegiatan industri atau pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten dari Provita Papun yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya melalui UU No. 26 Tahun 2002 dengan ibukota bernama Oksibil. Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi salah satu dari 25 kabupaten di Papua yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Pada awal kabupaten ini dimekarkan, hanya ada enam distrik (data BPS tahun 2002). Kemudian tahun 2005., kabupaten ini memiliki 10 distrik. Lalu tahun 2006 menjadi 12 distrik. Mulai saat itu, pemekaran distrik terus dilakukan hingga diusia ke 12 tahun, tepatnya 5 Mei 2015, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki 34 distrik dengan 277 kampung. Ada 8 distrik (Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur), 62 kampung dengan jumlah penduduk 18.448 jiwa yang berada di perbatasan dengan negara Papua Nugini Sebagian besar penduduk di 8 distrik ini, fasih mengunakan bahasa Pidgin Bahasa Pidgin merupakan salah satu bahasa yang digunakan beberapa negara di Pasifik Selatan, diantaranya PNG, Vanuatu dan Kepulauan Salomon.

Menurut data BPS terbitan tahun 2014 menyebutkan, dari luas wilayah 15.683 km², sebagian besar atau 66 persen wilayah kabupaten ini terdiri dari kawasan pegunungan, 27 persen kawasan perbukitan, 4 persen lembah aluvial, 2 pesen dataran aluvial dan I persen dataran. Kabupaten ini berada di ketinggian 2.000-3.000 meter di

atas permukaan laut dan termasuk salah satu kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua. Batas wilayah pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu:

- Utara dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura
- Selatan dengan Kabupaten Boven Digul
- Barat dengan Kabupaten Yahukimo
- Timur dengan negara tetangga Papua Nugini.

B. Kondisi Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang- Papua Nugini

Salah satu permasalahan yang ada di perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang-Papua Nugini adalah minimnya jumlah pos perbatasan yang ada. Pos-pos perbatasan yang telah disepakati yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah Pos Perbatasan di Distrik Batom. Kiwirok Timur, dan Iwur. Pos Perbatasan yang telah ada berada di Distrik Kiwirok, Batom, dan Oksibil Pos-pos perbatasan dibuat berdasarkan tingginya aktivitas pelintasan batas di titik-titik tersebut, dibandingkan dengan titik-titik lainnya.

Meskipun pemerintah provinsi telah mendirikan bangunan yang permanen, tetapi mengingat fasilitas yang tersedia, aparat CIQS (Custom, Imigration Quarantine and Security) hanya bekerja di pagi sampai sore hari, setelah sore aparat pulang ke Jayapura Sebenarnya pemerintah provinsi juga sudah membangun rumah tinggal di dekat pos perbatasan untuk para aparat CIOS, tetapi mengingat kondisi keamanan yang masih rawan dari kelompok bersenjata, mereka masih belum menempatinya.

Pemerintah RI dan Papua Nugini juga sudah menetapkan lokasi pilar batas antar kedua negara. Masing-masing negara mempunyai kewajiban memelihara pada lokasi pilar batas yang sudah disepakati. Pilar batas tersebut berjumlah 52 buah, di mana

Pemerintah Indonesia berkewajiban memelihara sebanyak 24 buah sedangkan Pemerintah Papua Nugini berkewajiban memelihara sisanya.

Aparat yang bertugas di sekitar pos perbatasan hanyalah aparat dari TNI. Pos TNI berada di sekitar pos perbatasan dan dibangun secara permanen serta dengan sarana dan prasarana yang masih jauh dari memadai (listrik masih belum tersedia, demikian juga air minum masih mengandalkan dari air hujan). Terlepas dari itu, penempatan personil TNI dilakukan secara rotasi, sehingga ketika aparat belum mengenal secara baik kondisi sosial dan budaya di sekitar pos tersebut, mereka telah harus pindah ke pos lainnya. Akibatnya, sering terjad kesalahpahaman antara masyarakat sekitar dengan aparat TNI, karena kurangnya pengenalan terhadap kondisi sosial dan budaya setempat.

Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar perbatasan juga mengharuskan aparat, khususnya aparat keamanan untuk bekerja dengan pemahaman yang lebih baik Masyarakat sekitar perbatasan tidak begitu menganggap adanya batas negara. Hal ini terjadi karena pelintas batas tradisional banyak yang memiliki tanah ulayat di bagian negara lain. Masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia seringkali memiliki tanah ulayat yang merupakan lahan garapan yang berada di wilayah Papua Nugini, demikian juga sebaliknya masyarakat yang tinggal di Papua Nugini setiap hari bercocok tanam di lahan wilayah Indonesia.

Untuk daerah yang dekat dengan pos perbatasan, pengawasan masih dapat dilakukan dengan mudah, tetapi untuk daerah-daerah yang jauh dari perbatasan tidak mungkin dilakukan pengawasan yang optimal, belum lagi masyarakat yang tercatat sebagai penduduk di kedua negara. Hal ini terjadi karena satu orang mempunyai lebih dari satu nama, karena dimungkinkan oleh budaya setempat. Sehingga seringkali ketika

berada di Indonesia maupun di Papua Nugini nama yang digunakan berbeda. Baik RI maupun Papuan Nugini mengakui dan mengijinkan pergerakkan melintasi perbatasan antar negara yang dilakukan oleh penduduk tradisional, karena kelahiran atau perkawinan masyarakat ini secara tradisional melakukan kegiatan melintasi perbatasan. Kegiatan tradisional yang dimaksud meliputi hubungan sosial dan upacara-upacara termasuk perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah, penangkapan ikan dan penggunaan perairan, perdagangan perbatasan, olahraga, serta kegiatan kebudayaan

Garis batas perbatasan yang sangat panjang dan kondisi alam yang sulit untuk dijangkau, terkadang menimbulkan masalah yang yang cukup pelik. Seperti halnya terjadi di Warasamol, suatu daerah yang berada dalam wilayah Indonesia tetapi secara administratif pemerintahan Papua Nugini berjalan efektif. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena jika keadaan seperti ini dibiarkan dalam waktu lama maka proses peng-Indonesia-annya menjadi lebih sulit. Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila keadaan seperti ini merembet ke daerah-daerah lainnya. Sebenarnya masih banyak penduduk Indonesia yang masih tinggal di Papua Nugini karena alasan tertentu. Pada zaman orde baru. banyak penduduk RI yang mengungsi karena alasan politik. Pada awalnya mereka diterima baik oleh masyarakat Papua Nugini, tetapi sekarang masyarakat Papua Nugini mulai tidak suka kepada mereka. Pemerintah RI dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Papua Nugini sebenarnya sudah sepakat untuk mengembalikan para pengungsi ini ke Papua. Meski demikian. belum semua warga negara Indonesia yang telah kembali dari Papua Nugini.

C. Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang

Permasalahan pembangunan di berbagai bidang yang saya paparkan dibawah

ini hanya sebagaian kecil dari seluruh permasalahan pembangunan di Kabupaten pegunungan Bintang Papua yang sangat kompleks.

a) Pendidikan:

1. Pengelolaan manajemen pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar yang belum maksimal;
2. Guru dan Tenaga Kependidikan yang belum tersedia secara merata:
3. Ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang terbatas dan belum merata, terutama rumah dinas guru dan tenaga kependidikan: Permasalahan yang ada di poin 2 dan 3 diperkuat dengan data berikut: Pada tahun 2014 jumlah TK sebanyak 6 unit dengan guru berjumlah 22 orang dan 389 murid, SD sebanyak 84 unit dengan guru berjumlah 519 orang dan 10.224 murid, SMP sebanyak 13 unit dengan guru berjumlah 142 orang dan 1.418 murid, SMA sebanyak 3 unit dengan guru berjumlah 59 orang dan 388 murid, SMK sebanyak 2 unit dengan guru berjumlah 25 orang dan 273 murid.
4. Kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar;
5. Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan belum sepenuhnya melanjutkan pendidikan;
6. Tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Data tahun 2014 menunjukkan dari total angkatan kerja sebesar 45.472 orang, 65.25 % diantaranya tidak atau belum pernah sekolah. Hal ini juga dapat menjadi indikator yang menunjukkan rendahnya kualiatas sumber daya manusia (SDM) di Kab. Pegunungan Bintang.

b) Kesehatan:

1. Masih kurangnya teriaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan Luas wilayah Kah: 15.583 km2 dengan jumlah dokter PTT (pegawai tidak tetap): 24 orang, maka: 1 dokter PTT bertanggung jawab menaungi wilayah pelayanan kesehatan rata rata seluas: 653,45 km2 Jumlah penduduk Kah Pegunungan Bintang 105.897 orang, maka 1 dokter PTT bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap 4412.2 orang
2. Ketersediaan sarana/prasarana kesehatan yang terbatas dan belum merata Hal ini diperkuat dengan data berikut Pada tahun 2014, jumlah puskesmas di Kabupaten Pegununungan Bintang sebanyak 29 unit, puskesmas pembanta sebanyak 12 unit.
3. Mahalnya transportasi udara menjadi kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat Rata-rata harga penerbangan ke distrik dengan pesawat misionaris: + Rp. 20 juta satu kali terbang.

c) Transportasi

1. Seluruh wilayah Pegunungan Bintang sangat terisolir, dimana hubungan antara distrik, dan antara kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi hanya mengandalkan transportasi udara/pesawat dengan biaya relatif mahal/tinggi.
2. Sementara kondisi lapangan terbang yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat yang pada umumnya masih berkonstruksi rumput hanya yang hanya dapat didarati pesawat kecil. Lapangan terbang yang dapat didarati pesawat Cessna dan Twin Otter. Lapangan terbang tersebut meliputi lapangan terbang Oksibil, Batom, yang dapat didarati Twin Otter, sementara lapangan terbang lainnya hanya bisa didarati pesawat Cessna.

3. Penerbangan sangat dipengaruhi dan tergantung kondisi cuaca. Hampir semua lapangan terbang di seluruh Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang hanya dapat berfungsi pada waktu-waktu tertentu, yaitu antara jam 06.00 sampai dengan jam 11.00 WIT. Keterbatasan transportasi berdampak terhadap tingkat kemahalan harga barang, dan menjadikan kabupaten ini menempati urutan kedua termahal setelah Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua. Harga tiket untuk sekali terbang, tergolong mahal bila dibandingkan harga tiket Jayapura - Jakarta. Misalnya pada Maret 2015. harga tiket dari Sentani Jakarta sekitar Rp 1.4 juta sampai Rp 1.6 juta dengan waktu terbang lebih dari 5 jam. Tapi dari Sentani ke Oksibil, harganya sekitar Rp 1.5 juta sampai Rp 2 juta sekali terbang dengan waktu terbang 45 menit. Bahkan pada hari-hari tertentu, tiket bisa melonjak sampai 2.5 juta di luar agen resmi Trigana.
4. Kondisi jalan yang ada masih berupa jalan tanah, buik jalan dalam kota kabupaten maupun jalan antardistrik. Khusus untuk jalan antar distrik dalam keadaan rusak dan berupa jalan setapak bahkan sebagian sudah tertutup hutan dan semak belukar.

d) Energi dan Ketenagalistrikan

1. Ketersediaan pasokan listrik masih sangat terbatas. Listrik PLN yang ada hanya di ibukota kabupaten dan dengan kapasitas yang terbatas, hanya sebesar 250 kWH.
2. Sumber listrik di distrik berupa disel, solar sel dan aki dengan kapasitas dan tingkat penggunaan yang terbatas. Sumber listrik tersebut umumnya dimiliki oleh pemerintah/kepala distrik dan missi/gereja.
3. Pembangunan energi dan tenaga listrik terkendala dengan modal yang besar dan teknologi tinggi juga jumlah penduduk sedikit dan tersebar serta kondisi geografis yang cukup sulit.

e) Telekomunikasi dan Informatika:

1. Belum tersedianya Kantor Pos dan Giro.
2. Ketersedian sarana informasi dan komunikai yang terbatas: telepon umum dan televisi umum baru tersedia di 7 distrik; belum tersedianya sarana telepon tetap dari PT. Telkom, jaringan dan pelayanan telekomunikasi selular hanya sebatas dapat melayani pelanggan yang berada di Kota Oksibil, sedangkan di distrik-distrik lainnya belum dapat terlayani:
3. Kegiatan komunikasi antarwilayah distrik dan dengan wilayah luar kabupaten selama ini menggunakan (SSB) Single Side Band (jenis komunikasi yang memakai frekuensi) milik Departemen Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemerintah dan Misionaris. Semua komunikasi dan informasi melalui siaran RRI Wamena dan RRI Jayapura. Disamping itu juga ada beberapa buah TV milik petugas pemerintah dan misionaris yang menggunakan antena parabola. Penggunaan HP satelit untuk komunikasi keluar kabupaten hanya terbatas pada beberapa petugas pemerintah.

f. Air Bersih dan Drainase

1. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat mengandalkan dari tampungan air hujan, sumur air dangkal dan air sungai/kali dengan tingkat sterilisasi sangat rendah karena air pegunungan banyak mengandung zat kapur.
2. Penyediaan air bersih yang terbatas. Penyedian air bersih masih terbatas pada distrik tertentu saja (Oksibil)
3. Belum adanya/belum optimalnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu 4 Buruknya kualitas dan kuantitas ketersedian air.

(g) Permasalahan lainnya di Kabupaten Pegunungan Bintang antara lain:

- Kondisi perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang-Papua Nugini yang rawan konfilk, baik konflik etnis, agama maupun konflik lain yang datang dari kelompok separatis (kelompok radikal).
- Perdagangan Ilegal.
- Peredaran minuman keras yang tinggi & maraknya perjudian dikalangan pejabat.

D. Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang

Data dibawah ini merupakan kegiatan pokok pembangunan sekaligus merupakan capaian dari Pemda Kab.pegunungan Bintang Papua sampai tahun 2012. Data dibawah ini dihimpun dari website Pemda Kab.Pegunungan Bintang.

a) Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2016. Kondisi pendidikan yang memprihatinkan telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal mulai berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang. Mulai tahun 2003 hingga saat ini telah banyak dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan telah memberikan dampak membaiknya kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya anggaran dan aparatur serta hambatan kondisi geografis wilayah yang berat, tujuan pembangunan pendidikan di daerah belum sepenuhnya terwujud.

Dalam upaya percepatan pembangunan pendidikan di daerah, disusun strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu

1. Pengawasan, Pembinaan secara kontinyu. Konsisten kepada Tenaga Pendidik.
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan lewat pelatihan, penataran kursus, kualifikasi dan sertifikasi guru.
3. Pengembangan serta pembenahan sarana prasaran berbagai jenjang pendidikan demi terwujudnya pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien yang berpola wilayah.
4. Mengakomodir siswa/siswi berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah unggulan serta pendidikan tinggi dalam daerah dan luar negeri.
5. Pendataan penduduk buta aksara dengan anak usia putus sekolah yang akurat.
6. Meningkatkan kesejateraan tenaga kependidikan demi untuk memberikan motivasi dalam kinerja.

Dalam upaya pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan dimaka maka arah kebijakan yang ditempuh adalah

1. Meningkatkan Manajemen Pelayan Pendidikan yang terjangkau dengan kebijakan:
2. Mewujudkan manajemen kelembagaan Pendidikan tingkat Distrik dalam memperpendek jangkauan Pelayanan Pendidikan.
3. Mewujudkan manajemen pelayanan tingkat jenjang Pendidikan (sekolah) melaui Pelaksana, Pengawas.

2) Meningkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan melalui berbagai kebijakan

- Meningkatkan kualifikasi pendidikan bagai guru dan tenaga kependidikan.
- Meningkatkan kader yang siap memnjadi guru.
- Meningkat peserta didik yang siap bersaing pada Pendidikan Mengah dan Tingkat Perguruan Tinggi baik lokal. Nasional maupun Internasional.

- Meningkatkan pengembangan kuriklum pada berbagai tingkat satuan Pendidikan (Sekolah).

- Meningkatkan sarana prasana di setiap jenjang pendidikan sebagai faktor penunjang dalam proses pembelajaran.

3) Mewujudkan Pembangunan Pendidikan berbasis wilayah dengan arah kebijakan:

- Mewujudkan kawasan Pendidikan yang memiliki daya tampung, basis pengembangan mutu dan menjadi pusat belajar dari kelompok masyarat yang terbelakang.

- Meningkatkan daya tampung bagi anak-anak usia sekolah.

4) Meningkatkan pelayanan terhadap kelompok kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan dengan kebijakan:

- Meningkatkan pelayanan terhadap kelompok putus sekolah dengan membentuk Pusat Kegiatan Kelajar Masyarakat (PKBM)

- Meningkatkan pelayanan terhadap kelompok usia dini untuk memasuki usia sekolah.

- Meningkatkan pengembangan mutu pelayanan terhadap Pelaksana dan pelaku kelompok putus sekolah.

5) Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan dengan kebijakan:

- Meningkatkan pelayanan nasip, kesejahteraan pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai langkah operasional terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan, program strategis yang diprioritaskan antara lain:

1) Pembangunan sekolah berbagai jenjang pendidikan yang selama ini terpencar di lereng-lereng gunung perlu pembangunan Kawasan Pendidikan Berpola Asrama dalam satu wilayah tertentu untuk meningkatkan Manajemen Pengelolaan, Pengawasan dan SDM secara efektif dan efisien.

2) Guru dan Tenaga Kependidikan yang tersedia sangat kurang karena banyak yang sudah pesiun, mutasi dan meninggal dunia, sehingga pembagian tidak sesuai dengan kebutuhan setiap Sekolah, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat menyiapkan lulusan SMP, SMA/SMK melanjutkan ke Pendidikan Guru untuk memenuhi kebutuhan Guru

3) Pembangunan Rumah Dinas Guru belum mencukupi kebutuhan, oleh sebab itu pemerintah daerah berusaha membangun perumahan guru secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan rumah guru berbagai jenjang pendidikan.

4) Sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen bahwa para Guru dan Dosen perlu meningkatkan Kualifikasi Pendidikan, terutama guru di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagian besar belum memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan, oleh sebab itu pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan kualifikasi guru di berbagai jenjang pendidikan secara bertahap untuk memenuhi standar kualifikasi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga kependidikan.

5) Lulusan dari berbagai jenjang Pendidikan belum sepenuhnya melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berusaha menyiapkan lulusan siswa berbagai jenjang pendidikan agar dapat melanjutkan pendidikan di berbagai sekolah unggulan terutama pendidikan tinggi di dalam maupun luar daerah secara berkelanjutan dan konsisten untuk meningkatkan SDM yang berkualitas.

6) Pendataan buta aksara, putus sekolah belum dikelola secara maksimal. Olch sebab itu, Pemerintah Daerah berusaha mendata kembali penduduk buta aksara dan putus sekolah secara valid agar dapat dibangun Pusat Belajar yang disebut PKBM untuk menuntaskan buta aksara dan putus sekolah secara berjenjang menuntaskan buta aksara dan mengurangi angka putus sekolah.

Beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sampai tahun 2012, antara lain:

1. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan:

- Gedung sekolah
- Rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah
- Pembangunan perpustakaan dan laboratorium sekolah
- Perlengkapan laboratorium dan alat peraga edukasi

2. Pengadaan guru

3. Peningkatan mutu tenaga pendidik

4. Pengembangan sekolah berpola asrama dan sekolah satu atap

5. Pengembangan sekolah menengah kejuruan

6. Pembebasan biaya SPP dan UAS/UAN

7. Penyediaan biaya studi di sekolah lokal dan luar Pegunungan Bintang (SD, SMP, SMA, PT)

8 Beasiswa

Selain itu, langkah strategis lain yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya mempersiapkan putra-putri asli Papua sebagai generasi penerus bangsa berupa pengiriman siswa-siswi untuk menempuh pendidikan di luar kabupaten baik di Papua

maupun luar Papua. Demikian juga Pemerintah Daerah tengah menjadi kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kaitan hal tersebut, beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

1) Beasiswa S1 dan S2 di Perguruan Tinggi :

- Papua: Uncen. Unipa, USTJ, Uniyap, UOG, Stikom, STIE Port Numbay, STT Fajar Timur, STT Waterpost, IPI. Luar Papua: UGM, Sanata Dharma, UKSW Salatiga, STPMD Yogya 2) Pengiriman siswa SD, SMP, SMA di sekolah di Jawa: Muntilan, Sleman, Semarang, Yogya.
- Pengiriman siswa ke STPDN Jatinangor Bandung. 4) Pengiriman siswa ke Perguruan Tinggi di Cina: kedokteran, pertambangan, teknik sipil.
- Sekolah Pilot
- Seleksi AKABRI, AKPOL

b) Kesehatan:

1. Pendirian Rumah Sakit Umum Oksibil.
2. Pembangunan dan peningkatan prasarana kesehatan, kondisi saat ini jumlah Puskesmas Perawatan 4 unit. Puskesmas 25 unit dan Puskesmas Pembantu 6 unit.
3. Pengadaan peralatan medis dan non medis
4. Pengadaan obat
5. Rujukan.
6. Pembangunan rumah tenaga medis dan paramedis.
7. Pelatihan bagi perawat, bidan dan kader.
8. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas melalui penempatan dokter PTT (pegawai tidak tetap).

9. Pelayanan dokter terbang yang menjangkau setiap kampung di seluruh penjuru wilayah kabupaten.

10. Penyuluhan kesehatan

c) Transportasi:

1. Peningkatan Bandara Oksibil. Runway 1.400m x 30m, bisa didarati pesawat jenis Dash 7 dan ATR-42. Termasuk pengembangan sarana pendukung. antara lain pembangunan VIP Room Bandara Oksibil dan pengadaan peralatan navigasi.

2. Peningkatan dan pembukaan Bandara Perintis sebanyak 65 buah yang tersebar di 34 distrik.

3. Penyiapan pelayanan transportasi udara antar distrik, berupa pembangunan Sub Base dimaksudkan untuk menghadirkan beberapa pesawat yang her-homebase di Oksibil, sehingga dapat mempercepat pelayanan anus barang dan penumpang secara kontinyu khususnya untuk mengangkat produk-produk pertanian dari distrik ke ibukota kabupaten dan sebaliknya

4. Pada tahun 2011, jumlah penumpang umum yang datang melalui Bandara Oksibil berjumlah 29.500 orang, dan berangkat 12.088 orang. Angka ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 4.204 orang Mobilitas penduduk ini masih perlu ditingkatkan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi percke masyarakat

5. Pembangunan jalan dalam Kota Oksibil

6. Pembangunan Jalan Kabiding-Kutdol sepanjang 6.7 km

7. Pembangunan Jalan Oksibil-Kawor Iwur-Mindiptana sepanjang 23 km

8. Pembangunan Jalan Lokasi III Serambakon sepanjang 16 km.

9. Pembangunan Jalan PKT-Dabolding sepanjang 1 km

10. Pembangunan Jalan poros desa di 38 desa tersebar di 10 distrik sepanjang 152 km.

d) Telekomunikasi dan Informatika:

Pada tahun 2004 mulai dibangun jaringan TELKOMSEL di Oksibil. Untuk mengatasi ketertinggalan informasi dari kampung ke distrik dan dari distrik ke ibukota kabupaten maka secara bertahap distrik-distrik dilengkapi dengan SSB dan telepon satelit Pada tahun 2009 dan 2010 di bangun jaringan TELKOMSEL di Kiwirak dan Batom. Tahun 2013 akan dibangun jaringan di Iwur. Templu dan Tinibil untuk membuka keterisolasian informasi. Pada tahun 2007 juga telah dibangun menara TVRI Pegunungan Bintang di Oksibil sebagai sarana informasi bagi masyarakat di Kota Oksibil

e) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

1. Pembinaan Pengusaha Asli Papua

Orang asli Papua yang dapat dikategorikan pengusaha sukses di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini masih sangat korang. Hal ini disebabkan Larens kalah bersaing dengan pengusaha Nom Papus dalam hal memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadam Baring dan Jasa Pemerintah, yang telah diubah urakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) dalam hal kurangnya permodalan dan kurangnya dukungan peralatan berat

Sampai saat ini, jumlah pengusaha di Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai 132 orang melipun 130 usaha konstruksi dan 2 usaha jasa konsultansi Sedangkan pengusaha anli Papua sebanyak 107 orang Yang telah berhasil 20 orang dan 30 orang sedang berkembang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provima Papua Barat, dimana PERPRES dimaksud memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka diharapkan ke depan akan muncul banyak orang asli Papua menjadi pengusaha sukses di Kabupaten Pegunungan Bintang.

2 Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Pegunungan Bintang juga merupakan suatu Kabupaten yang memiliki areal lahan tidur yang sangat luas dengan tingkat kesuburan Jahannya sangat tinggi sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan darat.

Tanah di Kabupaten Peganungan Bintang sebagian besar bertekstur halus dengan kedalaman efektif 51-100 cm. Topografinya didominasi oleh bukit-bukit dan pegunungan di bagian tengah, sedangkan dibagian Utara dan Selatan hanya sebagaian kecil yang merupakan dataran rendah. Pada wilayah dataran rendah banyak dipengaruhi oleh endapan sangat sehingga sering dijumpai jenis tanah Aluvial Kolovial dan Gleisol Pada daerah landai ditemukan jenis tanah Kombisol dengan sifat tanah yang masam dan hasah Pada daerah-daerah Pegunungan yang curam sering ditemukan singkapan-singkapan batuan dan jenis Litosol. Sedangkan pada daerah bergelombang dengan jenis sana Potsonok dan Modition

Tingkat kesuburan tanah dari masing-masing jenis tanah tersebut tergantung dan kedalaman lapisan organik yang dipengaruhi oleh vegetasi di atainya.

3. Pengembangan Taman Kopi Perobangunan perkebunan di Kabupaten Pegunungan Bintang diarahkan untuk pemberdayakan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang.

Komoditi tanaman perketsuman yang dikembangkan di Kabupaten Pegunungan Bintang selama ini adalah tanaman kakao, kelapa dalam, vanili serta kopi yang menjadi primadona dan merupakan komoditas unggulan. Luas kebun kopi di Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 655 ha terdiri dari tanaman yang sudah berproduksi sebesar 110 ha dan yang belum herproduksi sebesar 545 ha dan tersebar di beberapa distrik antara lain Distrik Okbibab, Okbab, Kiwirok. Kiwirok Timur, Borme, Okhika, Weime, Bime dan Pepera, dengan rata-rata produksi 500 kg/ha/tahun atau 55 ton/tahun dan melibatkan 375 KK.

Untuk merangsang petani agar tetap semangat dalam melakukan kegiatan penanaman kopi, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan bekerja sama dengan koperasi pada tahun anggaran 2013 mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.3 milyar untuk membeli dan memasarkan biji kopi dari masyarakat sebanyak 28 ton. Disamping itu sarana dan prasarana pasca panen terus dilengkapi dengan harapan agar kualitas dan kuantitas serta kontinuitas kopi dapat tetap terpenuli sesuai standar permintaan pasar, bark pasar nasional maupun internasional. Selain peningkatan produksi kopi melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sarana pasca pasen seperti lantai jemur, padang penampungan hasil produksi kopi serta alat pengupas biji kopi basah dan kering terus dilengkapi. Selain itu pemerintah mencanangkan gerakan menanam kopi dengan semboyan tiada hari tanpa men kopi selain tanaman kops dijadikan sebagai tanaman konservasi lahan untuk mendukung daya dukung produktiviti lahen secara berkesinambungan, tanaman kopi diharapkan menjadi salah sat komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani kopi sekaligus untuk meningkatkan Pendapatao Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pegunungan Bintang

Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangan komoditas kopi antans lain Kondisi pografi daerah yang cukup berat dan bergumate-gung merrychubkan seluruh aktivitas transportan melalu udara sehingga mengakibatkan hiaya angkut lebih mahal

f) Pemerintahan

1. Penanganan Sengketa Batas Wilayah

Penetapan batas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang belum dilakukan koordinasi dengan Kabupation lain secara insentif. Berdasarkan hasil shadi Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan letak wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang secara geografis, yaitu diantara 140005 00-141000'00' Bujur Timur dan 3004'00-502000" Lintang Selatan.

Pada bulan November 2007 telah dilakukan dialog berkaitan dengan batas wilayah antara Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Kecrom yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papon, dihadin oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pemerintah Kabupaten merupakan Binting Dialog im masih langkah awal untuk menghimpun data-data kongret u ditindaklanjuti melalui perteman-pertemuan berikutnya, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut, sehinggs perhiasan antara Kabupaten Peguampas Bintang dengan Kabupaten Kecrom dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Yahnkimo mengarah pada sumber konflik antar kabupaten Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman dan kesadaran bersama balss hat antar kabupaten berpegang pada Undang-Undang Pembentukan Kabupation dalam hal ini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 13 Kabupaten di Tanah Papua serta mengacu hata veilysh Kabupaten Induk sehingga dapat ditetapan pilar batas secara difinitif

yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan demikian batas antar Kabupaten tidak menjadi sumber konflik antar daerah.

Untuk batas antar Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan penataannya dengan bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan BPN Provinsi Papus untuk melakukan Pemetaan wilayah administrasi Distrik dan penentum batas-batasnya. hal ini dilakukan dalam rangka penertiban wilayah administrasi Distrik serta untuk menghindari terjadinya konflik antar Distrik.

Sedang untuk Hak Ulayat Masyarakat Adat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bekerjasama dengan HPN juga telah melakukan pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Adat yang baru Mencakup 2 (dua) wilayah Distrik yaitu Distrik Oksibil dan Distrik Popera, hal ini dilakukan agar masyarakat adat mengetahui secara pasti batas wilayah hak ulayatnya masing-masing sehingga akan menghindari terjadinya konflik antar masyarakat adat di masa-masa yang akan datang.

g) Upaya Pemerintah lainnya dalam Pembangunan di Kab.Pegunungan Bintang:

1. Pembangunan jaringan air bersih di Kota Oksbil tendiri dari pipa primer 5.300m, pipa sekunder 5.000m, 1 buah indtake dan I hush reservoir.
2. Pembangunan jaringan air bersih pendesaan.
3. Pembangun jaringan listrik dan pengadam 1 mit get 100 KVA di Kota Oksibil.
4. Telah dibangun 1.169 unit rumah mayakat tersebar di berbagai distrik

E. Potensi Kabupaten Pegunungan Bintang

a) Pertanian dan Perkebunan

Perkembangan perekonomian Kabupaten Pegunungan Hinang sangat terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti hs Hingga saat ini kegiatan pertanian di Kabupaten

Pegunungan Bintang masih bersifat subiden, berkala kecil, dan terbilang rendah produktivitasnya Sebagian besar hasil pertanian tidak berorientasi pasar, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Belum berkembangnya sektor pertanian di atas terutama disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kapasitas masyarakat
2. Sulitnya mengakses sumber-sumber daya produktif
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian

Berdasarkan data pemetaan luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang seluas 15.683 kilometer persegi dan dari luasan tersebut 10,58 persen atau 5.605 hektar merupakan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagian latsan pertanian tanaman pangan dengan rincian 8.156 hektar (2,22 persen) telah dimanfaatkan sedangkan 1.237.449 hektar (97,78 persen) belum dimanfaatkan Dengan demikian lahan potensial bagi pengembangan pertanian tanaman pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal masih sangat luas.

Pengembangan tanaman pangan yang dapat dilaksanakan pada potensi lahan kering dengan luas sekitar 157.267 ha dan potensi lahan basah seluas 66.200 ha, diarahkan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan pelaku ekonomi mengingat kehidupan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian Secara sosial hodayn, pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat sesuai dengan kehidupan adat masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam bidang pertanian. Apalagi, sesuai dengan karakter masyarakat Pegunungan Tengah Papua, masyarakat Pegunungan Bintang adalah masyarakat yang mandiri, memiliki budaya kerja keras dan semangat gotong royong yang sangat tinggi. Tantangan utama pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah mendorong perubahan pola pengusahaan pertanian dari yang bersifat subsisten menjadi pola tani yang berorientasi pasar

(ekonomis dan nilai tambah). Untuk mencapai sasaran tersebut. Pengembangan pertanian perto didukung oleh program peningkatan produk peningkatan produktivitas petani dan penguatan kelembagaan petani.

Berdasarkan data Das Pertanian Kabupaten Pegunungan Intang memiliki luas lahan bukan sawah schon 1.475 309 1 Lahun inkan sarah sert sebagian besar terdapat di Dutek ime yaim selas 96.542 the b 25.16% dari seluruh lass talin bukan sawah di Kabupaten Peugen Hitung Janis tanaman sayuran tenlin dan bayan kihistoring, sw, tomat, kag yang dihasilkan sebesar 3.340.11 ton Tubal-bulan yang tela dibudidayakan seluas 54.58 ha dengan menghasilkan prodidische 504.85 tom yang terdiri dari jeruk manis, manas, pi, ka jau biji, alpekat dan sentra produksi pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat pada umumnya

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan studi perwilayshan komoditas berdasarkan zona agro ekologi serta penusdan bilt jeruk manis, durian, nangka mangga dan ranibotan sebanyak 7.500 bibit, pengadaan hihit sayur-sayur da peralatan pertanian serta dilaksanakan pelatihan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Secara tradisional masyarakat Kabupaten Pegamangan Bintang telah akrab dengan tanaman perkebunan yaitu komoditas kopi. Laban perkebunan kopi yang diusahakan olch 289 KK seluas 62.24 ha dengan produksi mencapai 6.259 ton biji kopi.

Pengembangan perkebunan dengan potensial sekitar 507.710 hadiahkan pada upaya untuk memperkuat meningkatkan volume produksi hasil perkatman dan pendapatan petani melalui program pokok sebagai berikut peningk produksi dan produktivitas petani sets penguatan kelembagaan ekonomi petan Dari aspek lingkungan, pembangunan perkebunan ditujukan untuk mendukung pelestarian lingkungan terutama pada wilayah-wilayah pasalt, konservi mata air, dan

hutan lindung. Jenis tanaman perkebunan yang utama di kabupaten Pegunungan Bintang saat ini adalah komoditi kopi yang juga merupakan komoditi unggulan Luas lahan perkebunan kopi yang diusahakan 62.24 hektar yang dikelola oleh 289 Kepala Keluarga menghasilkan produk sebanyak 6.259 ton biji kopi.

b) Peternakan

Jenis ternak yang selama ini diusahakan di Kabupaten Pegumangan Bintang adalah dari jenis ternak besar (ruminansia) yaitu sapi perah sebanyak 26 ekor yang hanya terdapat di Distrik Oksbil, jenis ternak kecil yaitu babi sebanyak 41.298 ckor, kambing 60 ekor dan kelinci 1.008 ekor, jenis ternak unggas yakni ayam kampung sebanyak 11 657 ckor dan itik 368 ekor dengan produksi telur masing-masing sebanyak 3.988 kilogram dan 1.528 kilogram. Populasi terak terbesar sebagai konsumsi lokal masyarakat sebesar 72,068 ekor Sektor peternakan memiliki prospek yang sangat baik dan menjanjikan apabila dikembangkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dan peningkatan pendapatan usaha tani.

c) Perikanan

Salah satu komoditi yang dikembangkan di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah dari sektor perikanan Ikan yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan mas dan ikan nila merah. Luas areal budidaya perikanan air tawar adalah 1.532.991 hektar, jumlah kelompok pengelola sebanyak 162 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 2.164 orang. Jumlah produksi ikan mas sebanyak 84,24 ton, mujair 47,72 ton, nila 31,31 ton, lele 21,29 ton per tahun.

d) Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang masih berupa hutan dengan luas areal mencapai 1.532.991 Ha atau sekitar 94% dan luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang masih berupa hutan primer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan daerah Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh khatkan kys butan sebagai sumber dan taku industri Agar selalu terjaga kesel antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan halu hasil hutan diatur oleh Menteri Kehutanan.

Sementara itu, pembangunan kehutanan dengan potensi loss labum 304 341 ha diarahkan pada upays pelestarian, rehabilitasi ta kemeryarakatan dan perluasan kawasan hutan untuk kepentingan konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program-program sebagai berikut pengelol (pelestarian dan pemanfaatan) hutan linding dan hutan produksi melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pemantauan pengawan, pencin dan pengaturan pengelolaan hutan Dari spek ekonomi pembangunan kehitaman ditujukan untuk meningkatkan daya dorong ekonomi khomonya produksi non kayu dan produksi kayu, dengan garipan fungsi utamanya yaitu mendukung kelestarian lingkungan tetap terjamin kualitasnya.

e) Pariwisata

Alam yang indah mempesona dan mmih alami dengan satwa liarnya serta budaya dan adat istiadat yang masih terjaga dengan baik, merupakan objek wisata yang diminati oleh wisatawan manca negara. Potemi ini akan menjadikan kabupaten Pegunungan Bintang sebagai

tujuan daerah wisata alam (ecotourimi) dan wisata budaya serta memiliki petemi anggrek yang sangat baik dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan di daerah (PAD) Kabupaten Pegunungan Bintang.

f) Pertambangan

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten. Akan tetapi perlu diingat bahwa semus potensi tersebut jika dilakukan kegiatan penambangan perlu mendapat perhatian yang serius. Potensi tambang yang terdapat pada kawasan ini berupa balan tambang tembaga, emas, perak, besi seng nikel dan kromit dengan luas kawasan mencapai 29.613 ha. Pembinaan pertambangan perlu diberikan kepada pengusaha pertambangan terutama pertambangan rakyat, pertambangan perorangan guna memperoleh data produksi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja para penambang.

Kabupaten Pegunungan Bintang yang dibentuk oleh berbagai jenis batus sedimens, batum beku, dan batuan metamorf dengan sebaran yang cukup luas sehingga daerah ini potensial memiliki berbagai jenis batuan tambang, seperti emas, tembaga, tikel, minyak bumi dan gas bumi yang tersebar di Distrik Oksibil. Okhibah dan Kiwirok Usaha penambangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah galian golongan C yaitu penambangan pani yang digunakan untuk bahan bangunan Penimbang ini banyak dilakukan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pegumongan dan tidak serorganisir sehingga banyak menyebabkan kerusakan lingkungan Bahan tambang yang menonjol meliputi emas, tembaga, minyak bumi dan gas bumi, yang tersebar di Distrik Oksibil Okhihab dan Kiwirck Potensi galian didominasi sich jenis bahan galian golongan C dan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

F. Fokus Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Strategi Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Pegunungan Bintang yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan perlu perubahan secara mendasar, terencana, dan terukur. Strategi Tahun 2011-2015 mengacu pada misi pembangunan Pegunungan Bintang, yaitu:

a.Strategi Pembangunan Berbasis Distrik

Distrik dijadikan basis pelayanan dan pembangunan, pendorong dinamika dan partisipasi masyarakat, pendorong pemerataan pembangunan, peredaran uang dan tenaga kerja serta titik tumbuh basis ekonomi wilayali dan pendorong pengembangan kampung Selain itu sejak dini dapat menahan ans urbanisasi dari kampung dan distrik ke ibukota kabupateit, mencegah timbulnya masalah-masalah sosial, ekonomi kerusakan lingkungan serta keamanan dan ketertiban di ibukota kabupaten Untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, ekonomi, informasi dan komunikasi serta optimalisasi peran unit-unit pemerintahan yang ada dipacu dari awal.

b. Strategi l'embangunan Berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam membangun daerah lebih mengedepankan peran serta masyarakat, gereja, lembaga dat, pemuda, perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah Daerah menjadi fasilitator dan motivator. Masyarakat tidak lagi dijadikan obyck tetapi sebagai subyek pembangunan sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program dan hasil pembangunan yang masuk di tiap distrik dan kampong.

c. Strategi Pembangunan Berorientasi Kewilayahan.

Dalam strategi ini pembangunan diarahkan untuk mendorong pengembangan wilayah pemerintahan, pemerataan pembangunan antar wilayah, mempercepat pengembangan kawasan-kawasan strategis dan tumbuh cepat, kawasan sentra potensi dan produkai, menata kawasan permukiman dan kawasan perbatasan (RJ-PNG)

d. Strategi Pembangunan Berwawasan Ramah Lingkungan.

Adalah pembangunan yang memperhatikan keselarasan dan keserasian antara lingkungan sosial masyarakat. lingkungan fisik serta lingkungan sumber daya alam yang ada.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Untuk Kabupaten Pegunungan Bintang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provimi Papua sesuai Perda nomor 10 tahun 2006 tentang RPJMD Provinsi Papua, maka kebijakan pembangunan Provinsi Papua yang berkaitan dengan Kalsipaten Pegunungan Bintang diarahkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program Turun Kampung (TURKAM) dengan tujum menjadika masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan masyarakat kampung yang damai dan sejahtera dengan kegiatan utama antara lain berupa pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan ekonomi rakyat, pemenuhan perumahan rakyat yang sehat dan layak huni, penyediaan sarana dan prasarana masyarakat kampung.
- Pelaksanaan program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) dengan tujuan menyamakan persepsi dan menjaring aspirasi masyarakat kampung dalam menyusun rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan serta melakukan sosialisasi program Respek dengan kegiatan utama antara lain penataan organisasi pemerintahan distrik dan kampung, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan

distrik dan kampung peningkatan sarana prasarana pemerintahan distrik dan kampung, penyusunan kriteria. prosedur dan petunjuk umum alokasi dan penggunaan dana OTSUS di tingkat distrik dan kampung.

- Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tertinggal dan perbatasan negara dengan kegiatan utama antara lain peningkatan sarana prasarana ekonomi dan sosial budaya masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan negara, pengembangan ekonomi lokal melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
- Pengembangan sentra industri potensial dengan tujuan meningkatkan teknologi dan kreatifitas industri kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk industri kecil unggulan yang berdaya saing dengan kegiatan utama antara lain pengembangan industri meubel kayu, rotan dan hambu, ancka souvenir dari kayu dan batang kelapa, industri pengolahan kopi dan kakao, pelatihan kerajinan anyaman dan noken, ukiran tradisional dari kayu dan kulit kayu serta pembuatan dan pengolahan minyak buah merah dan minyak atsiri, pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan, pelatihan pengolahan industri sagu, bantuan modal kerja bagi industri kecil. Pengembangan sarana prasarana perhubungan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan, antar kabupaten maupun antar kampung, adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah koondinasi antar tingkat pemerintah baik pusat maupun kabupaten/kota mengenai pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan yang tertuang dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Papus, adapun kegiatan utamanya adalah

sinkronisasi dan koordinasi prioritas pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal yang dilakukan bersama Pemerintah Pieat dan Kabupaten/kota, sinkronisasi dan koordinasi prioritas pengembangan jaringan jalan nasional provinsi, kabupaten/kota, jalan desa yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran, pembangunan kawasan pengembangan III (HUB 3) berupa pembangunan ruas jalan Waropko - Oksibil sepanjang 94 kilometer sehingga memudahkan aksesibilitas dari Kabupaten Boven Digoel dengan Pegunungan Bintang Pengembangan perhubungan udara merupakan sarana transportasi yang paling efektif bagi wilayah Papun yang kondisi topografisnya berbukit dan bergunung-gunung, sehingga kawasan di wilayah sengah Pulau Papus antara lain dapat terakses melalui pembangunan bandara Oksibil.

- Peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan dengan tuju pelihatan aktif kaum perempuan dalam setiap proses pembangunan malai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauannya Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pemetaan iso-in dan pengarumustamaan pender dalam selurah program pembangunan sosialisasi dan advokasi pengarantamaan pender kepada sekutif dans legislatif, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui penghormatan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan kebodohan kaum perempuan

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang

Berdasarkan misi pembangunan daerah, maka kebijakan saman Kabupaten Pegangan Hintang Tahun 2011-2015 diarahkan sebagai berikut

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perbaikan giri dan peningkan pendapatan masyarakat.

- Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu.
- Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD yang sederajat serta mengembangkan budaya baca dan menciptakan masyarakat pembelajar.
- Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengakomodir para lulusan program Wajib Belajar 9 Tahun.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.
- Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya,
- Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah. dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.

- Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan perbatasan.
- Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.
- Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan nasional, regional dan internasional termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik.
- Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan menyemaikan nilai-nilai demokrasi, wawasan budi pekerti, kebangsaan dan etika, estetika, kebudayaan dan lingkungan hidup dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat;
- Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran.

- Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

b. Mengembangkan dan membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang berkelanjutan.

- Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- Membangun koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (a) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi keuangan di tingkat makro maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang

menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat, (b) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (c) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

- Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; serta mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi maha unggulan wilayah.
- Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing. khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif.
- Mendorong kerjasama antar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan antara IKM dengan Bank.

- Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang kompetitif.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi
- dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan Iptek
- Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur agrobisnis dan agroindustry.
- Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha menjaga hak kepemilikan (property rights terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkantan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.
- Kebijakan perdagangan dalam daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, tertib niaga, dan kepastian berusaha.
- Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
- Mengembangkan sistem ketahanan pangan untuk meningkatan kemampuan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal:
- Meningkatkan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan:
- Mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan;

- Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan.
- Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- Memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumberdaya produktif dan pasar.

c. Meningkatkan aksesbilitas wilayah untuk mendukung mobilitas arus manusia, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Pegunungan Hintang (ke distrik dan ke ibukota kabupaten) sebagai pusat pelayanan dan pembangunan.

1.Mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang sesuaidengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah;

2. Mewujudkan keterpaduan sistem moda transportasi:

3. Membangun prasarana/sarana pengembangan kawasan tertinggal;

4. Mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayali;
5. Membangun prasarana dan sarana transportasi, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, meningkatkan mobilitas dan distribusi barang, membangun sistem transportasi yang berkelanjutan dan terpadu yang berbasis pengembangan wilayah, menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi;
6. Menyediakan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun

perdestan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penanganan prasarana jalan.
8. Mendorong keterlibutan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana transportasi.
9. Meningkatkan keselamatan dan kualitas prasarana dan sarana transportasi secara komprehensif dan terpadu.
10. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu:) penataan sistem jaringan dan terminal: nuanajemen lalu lintas pemasangan fasilitas dan rambu jalan: penegakan hukum dan disiplin di jalan mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; kerjasama antarlembaga pemerintah (pusat dan provinsi).
11. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis di daerah terpencil.

d. Membuka peluang investasi untuk pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam (hutan, lahan, tambang dan wisata)

- Mempersiapkan kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan kebijakan investasi terutama untuk sektor agrobisnis dan agroindustri,
- Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi terutama dengan menciptakan Perizinan Satu

Pintu dan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan pusat terutama di dalam pengembangan dan operasionalisasi usaha di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, efisiensi biaya dan waktu pengurusan.

- Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara .berkelanjutan,
- Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Merevitalisasi sektor pertanian sebagai sektor andalan yang didukung oleh sektor penunjang seperti pariwisata, jasa, perindustrian dan perdagangan dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi usaha.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dengan memacu komoditas unggulan yang diprioritaskan pada komoditas pertanian, perikanan dan peternakan.
- Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk perdesaan; Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu;
- Mengembangkan praktek-praktek usaha budidaya pertanian secara luas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pemanfaatan.
- Menyediakan akses berbagai jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, terpadu serta mencerminkan harga pasar.

e. Penguatan kelembagaan pemerintah kabupaten, distrik dan kampung dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip good and clean governance mengevaluasi di setiap SKPD, membangun, menerapkan dan efektivitas sistem pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat.

1) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi:

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.

3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebihbaik.

4) Memperkuat koordinasi perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

5) Memperkuat kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi dan Pihak Swasta.

6) Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD.

7) Meningkatkan kinerja produk hukum,peraturan, dan perundang-undangan.

8) Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan menuju manajemen modern yang meliputi aspek ketatalaksanaan, akuntabilitas pelayanan publik dan perubahan paradigma aparatur.

9). Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

10) Optimalisasi sumber penerimaan daerah.

11) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur pemerintah daerah;

12) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan umlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi

13) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

14) Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional. ramping, luwes dan responsif.

15) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

16) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;

17) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar. pelayanan umum dan pelayanan unggulan:

18) Peningkatan berpartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

19) Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

f. Membina dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya, Agama, Hukum, Semangat Kemandirian dan Gotong Royong dalam Masyarakat.

1) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal.

2) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

3) Merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal schogai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah;

4) Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam keberagaman:

5) Mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial.

g. Mendorong Terciptanya Stabilitas Wilayah Melalui Kerjasama yang Harmonis antara Pemerintah, Lembaga Adat dan Gereja serta Masyarakat

1. Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat.
3. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
4. Peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal.
5. Menata substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat.
6. Meningkatkan ketaatan hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan,
7. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis,
8. Mengembangkan sistem perlindungan sosial.

9. Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan.
10. Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum,
11. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
12. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
14. Meningkatkan peranserta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.
15. Menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

4. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan berbagai permasalahan pokok yang dihadapi, visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, maka ditetapkan 3 (tiga) agenda pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan daerah, yaitu

a. Agenda Meningkatkan Kemampuan Masyarakat melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan pengetahuan serta kemampuan anak didik, pemuda dan masyarakat.
- Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan Yang Berkualitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pola hidup.
- Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat. Program ini berkaitan dengan masalah penegakan harkat dan martabat masyarakat yang melekat pada aspek pemenuhan hak-hak dasar yang tujuannya antara lain terpenuhinya kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan dasar, terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sanitasi, air bersih dan lingkungan permukiman yang sehat.
- Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pemahaman penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pemantapan intern dan antar umat beragama.
- Program Pengembangan Kebudayaan dan Nilai-nilai Adat Program ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur, peninggalan sejarah dan adat istiadat: pembinaan generasi muda tentang etika, moral dan kepribadian berdasar budaya daerah, memperkuat jatidiri masyarakat dan daerah, meningkatkan peran kepala suku dan masyarakat adat dengan membangun wadah pembinaan dan pengembangan kebudayaan

daerah sehingga terwujud harmonisasi antara nilai-nilai baru dengan nilai-nilai sosial lokal yang mendukung pembangunan daerah.

b. Agenda Meningkatkan Kemandirian dan Taraf Hidup Masyarakat melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Penerobosan isolasi dan terbukanya jalur transportasi serta peningkatan aksesbilitas wilayah secara terpadu baik perhubungan darat, udara maupun radio, pos dan telekomunikasi yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. Disamping itu juga pemenuhan infrastruktur dasar kebutuhan hidup layak manusia. meliputi pembangunan perumahan dan permukiman, prasarana dasar air bersih dan listrik.

2) Program Pembangunan dan Revitalisasi Pertanian

Sasaran pembangunan dan revitalisasi pertanian adalah peningkatan produktivitas pertanian secara ekonomis dan meningkatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani, meliputi pengembangan ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi perkebunan. perikanan dan peternakan, pengembangan agribisnis, pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Disamping itu juga penataan dan pengembangan kawasan agropolitan, konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan jaringan irigasi/pengairan.

3) Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam rangka membentuk serta memperkuat dasar dan struktur ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

4) Program Peningkatan Investasi dan Pengembangan Sektor Swasta.

Peningkatan investasi dan pengembangan sektor swasta dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyusunan sistem informasi dan data potensi SDA yang strategis dan komoditas unggulan yang layak secara ekonomis untuk dikembangkan, melakukan kegiatan promosi terpadu untuk menarik minat sektor swasta untuk melakukan investasi, pengembangan wirausaha/kewirausahaan bagi pengusaha lokal dan pengusaha daerah.

5) Program Pembangunan Kampung dan Pengembangan Kawasan.

Program ini bertujuan terciptanya penataan ruang berbasis budaya dan adat lokal dengan jaringan infrastruktur yang menunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan, sehingga tercipta sentra-sentra produksi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam.

c. Agenda Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Program Kelembagaan Pemerintah Yang Baik (Good Government dan Clean Governance).

Dalam program ini dilakukan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, peningkatan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan fasilitas dan sarana kerja.

2) Program Pembinaan Kelembagaan Politik.

Peningkatan peran kelembagaan politik diarahkan pada pengembangan demokrasi, pendidikan politik dan kaderisasi bagi pengurus organisasi maupun masyarakat khususnya generasi muda. Kelembagaan politik sesungguhnya berfungsi sebagai lembaga pengembangan demokrasi dan saluran aspirasi masyarakat. Kelembagaan politik juga mendidik masyarakat untuk memahami kedudukan, hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara.

3) Program Perwujudan Kehidupan Demokrasi dan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Program ini bertujuan meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan secara demokratis dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik, agar tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan harmonis.

4) Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat semakin didorong peran lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, organisasi profesi dan organisasi massa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN

Perwujudan visi serta pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang pada lima tahun ke depan akan ditempuh melalui 6 (enam) prioritas bidang pembangunan. Prioritas bidang pembangunan tersebut yakni :

1) Bidang Sosial Budaya

a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

b) Sub Bidang Pemuda dan Olahraga

c) Sub Bidang Kesehatan

d) Sub Bidang Kependudukan

e) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

f) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

g) Bidang Kesejahteraan Sosial

2) Bidang Ekonomi

a) Sub Bidang Pertanian dan Perkebunan

b) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi

c) Sub Bidang Pariwisata

d) Sub Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

3) Bidang Sarana dan Prasarana

a) Sub Bidang Perhubungan dan Transportasi

b) Sub Bidang Pengairan dan Irigasi

c) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

d) Sub Bidang Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

e) Sub Bidang Tata Kota

4) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Sub Bidang Pertambangan dan Sumberdaya Mineral

b) Sub Bidang Kehutanan

c) Sub Bidang Lingkungan Hidup

5) Bidang Politik, Keamanan, Hukum dan Aparatur

a) Sub Bidang Perbatasan dan Kesbang Linmas

b) Sub Bidang Hukum dan Organisasi

c) Sub Bidang Pemerintahan

d) Sub Bidang Kepegawaian

e) Sub Bidang Umum, Humas dan Protokoler

f) Sub Bidang Sekretariat DPRD

6) Bidang Perencanaan, Penataan Ruang dan Pengawasan

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangnan dan Penataan Ruang

b) Sub Bidang Pengawasan

1. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan bidang sosial budaya mencakup bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan dan gizi, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, agama, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Kondisi sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang sangat membutuhkan peningkatan kualitas untuk mengelola potensi sumberdaya alam sehingga pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraannya. Peningkatan kualitas SDM diharapkan diawali dengan pembangunan sektor pendidikan Mengingat kondisi geografis wilayah yang berupa pegunungan dan letak permukiman masyarakat yang terpencar, maka pendidikan terpadu yang berpola asrama sangatlah tepat diterapkan di wilayah ini. Rencana pengembangan pendidikan akan dipusatkan di wilayah Oksibil, Batom dan Aboy.

Rendahnya pengelolaan sumberdaya alam juga disebabkan oleh masih terbatasnya kualitas dan kapasitas kelulusan siswa dengan kualifikasi kejuruan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga pendirian sekolah kejuruan pertanian menjadi kebutuhan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Adapun pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra asli daerah untuk pendidikan kejuruan seperti penerbangan, keguruan, kesehatan, kebidanan, Akpol. Akabri, dokter hewan, teknik sipil, arsitek. pertambangan lingkungan hidup, pertanian, ekonomi pembangunan dan lain-lain dilakukan di luar Pegunungan Bintang.

Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan atraksi seni budaya dan pentas

tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan pusat kebudayaan yang unik dan spesifik perlu memperhatikan keberagaman suku yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, pengembangan sanggar seni dan budaya perlu didasari oleh 6 kelompok suku yang ada yaitu Suku Ngalum di Distrik Oksibil dan Kiwirok. Saku Ketengban di Distrik Borme dan Rime, Suku Jetfa di Distrik Jetta. Suku Markim di Distrik Batom, Suku Murok Kambon di Distrik Kawor, Suku Lepki di Distrik Aboy).

Adapun program prioritas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- Program Pendidikan Usia Dini
- . Program Wajib belajar pendidikan dasar Dua Belas Tahun
- Program Pendidikan Menengah, Program Penyediaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Berkualitas .
- Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.
- Program Penyediaan Sistem Pembelajaran. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Program Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Non Formal:
- Program Penyediaan Layanan Pendidikan Non Formal Masyarakat,
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
- Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.

a.Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah memberikan

kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga. Adapun pembangunan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk (a) meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat provinsi dan nasional, (b) menyelenggarakan olahraga pendidikan. olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (c) membina dan mengembangkan olahraga sebagai sarana penyaluran bakat agar lebih profesional; (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga Adapun Lebijakan umum dalam pengembangan olahraga melalui pembangunan stadion di Distrik Serambakon diharapkan dapat menjadi titik awal dalam menyalurkan bakat, menggali potensi serta membina olahraga masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang

Adapun program prioritas dalam bidang pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Sumber Daya Kepemudaan dan Olahraga Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kepemudaan dan Olahraga.
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
- Program Peningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga

c. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang masih jauh dari rata-rata penduduk Indonesia, namun pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Seiring dengan masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan maka peningkatan Puskesmas Plus di Oksibil menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini mengingat semakin pentingnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes di setiap distrik juga merupakan kebutuhan yang mendesak.

Keberadaan tenaga medis dan paramedis menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Tantangan terbesar Pemerintah adalah bagaimana melakukan pengadaan dokter umum, dokter spesialis. bidan, serta paramedis lainnya seperti apoteker dan petugas laboratorium. Adapun pemberian beasiswa maupun ikatan dinas pendidikan bagi tenaga medis dan paramedis dirasakan menjadi alternatif terbaik untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan khususnya bagi putra/putri asli Pegunungan Bintang. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan juga sangat dibutuhkan guna meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan.

Adapun program prioritas dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kesehatan.
- Program Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan.

- Program Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular.
- Program Penyehatan Lingkungan.
- Program Peningkatan Pemerataan, Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
- Program Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

d. Kependudukan

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kabupaten Pegunungan Bintang terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberhasilan pembangunan kependudukan didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sumber data utama kependudukan diperoleh melalui SP. Supas, dan survei dengan tujuan khusus seperti SDKI, survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei angkatan kerja nasional (Sakemas) dan registrasi penduduk. Pendataan bagi pelintas batas negara dengan menerapkan kartu pelintas batas merupakan upaya efektif di Pegunungan Bintang dalam mengembangkan informasi kependudukan. Program pemutihan seperti pembuatan akta kelahiran secara massal dan gratis juga merupakan program kependudukan yang dirasa efektif dalam pembangunan kependudukan.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran sangat diperlukan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu. Meningkatnya

ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Adapun program prioritas dalam bidang kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut :

- Program Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk.
- Program Penataan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.
- Program Penyusunan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Program Pengembangan Sistim Informasi Kependudukan.

c. Pemberdayaan Perempuan

Upaya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat ditempuh melalui kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan: peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan; serta peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan. dan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006. Selain itu saat ini tengah dibahas perubahan RUU KUHAP yang mengupayakan untuk mengintegrasikan konsep sistem peradilan pidana terpadu antara aparat penegak hukum khususnya bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adapun program prioritas dalam bidang pemberdayaan perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam membina kesejahteraan keluarga, adalah sebagai berikut:

- Program revitalisasi Program Kerja PKK.
- Program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dan masyarakat.
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
- Program peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang holistik di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengubah perilaku ekonomi subsisten yang pada gilirannya berimplikasi pada perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat terutama melalui peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan aparat kampung dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai sangat berguna bagi pemerintahan kampung.

Program peningkatan kualitas aparat kampung dilakukan melalui Pengembangan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), pelatihan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung kepada aparat pemerintahan kampung, pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat kampung, dan pelatihan lainnya.

Adapun program prioritas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan kapasitas pemerintahan kampong.
- Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kampung Dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif.

g. Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam penanganan masalah-masalah sosial terutama kepada mereka yang belum dapat menikmati hasil pembangunan selama ini.

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Pegunungan Bintang antara lain adalah kondisi perumahan dan permukiman yang tidak layak, masyarakat hidup dalam kondisi yang

tidak menguntungkan serta mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Hal tersebut umumnya diakibatkan oleh mahalnya harga barang kebutuhan pokok serta kejadian bencana alam menyebabkan masih terdapatnya masyarakat dengan kondisi yang memerlukan perlindungan sosial. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah juga menghadapi serangkaian tantangan di masa mendatang yakni kecenderungan perubahan struktur demografi, kecenderungan urbanisasi, dan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin.

Program prioritas dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak.
- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Program Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat hidup secara layak.

2 Bidang Ekonomi

a Pertanian dan Perkebunan

Revitalisasi pertanian dalam arti luas difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan dan hortikultura, pengembangan sistem penyuluhan di daerah-daerah untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi produksi; pengolahan dan peningkatan mutu hasil optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, jalan desa dan jalan usahatani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat. Pengembangan sentra industri pertanian yang dipusatkan di wilayah bagian utara dan selatan Pegunungan Bintang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian.

Program pembangunan lainnya dalam mendukung pengembangan pertanian adalah pengadaan petani kontrak yang berasal dari petani di Jawa sebanyak 100 orang selama 5 tahun untuk pembukaan lahan pertanian berupa sawah dan kebun tanaman hortikultura. Setelah lahan pertanian terbuka diharapkan terdapat penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat lokal.

Ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan melakukan identifikasi wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang rentan. Peningkatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk pengembangan produk tanaman lokal seperti ubi jalar, talas, sagu dan sumber pangan lainnya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan telah lama diusahakan oleh masyarakat.

Pengembangan perkebunan sebagai produk unggulan lokal juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah petani dengan dilakukannya industri olahan lanjutan bagi produk perkebunan seperti kopi, vanili, buah merah, kelapa dalam, pinang dan produk perkebunan unggulan lainnya melalui pengembangan industri kecil dan rumah tangga.

Pengembangan budidaya perikanan air tawar berupa ikan nila, ikan mas, lobster air tawar dapat dilakukan bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, walaupun saat ini hanya dikembangkan secara tradisional dan terbatas bagi pemenuhan konsumsi rumah tangga, namun kedepan diharapkan dapat diusahakan untuk kepentingan yang lebih besar dan dapat dipasarkan. Pengembangan tanaman hortikultura seperti bawang bombay, sayur mayur dan buah-buahan juga diharapkan dapat diusahakan secara massal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati.

Program prioritas dalam bidang pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan: Program Penyaluran subsidi benih tanaman pangan.

- Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah dan sayuran.
- Program Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar.
- Program Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal.
- Program Pengembangan pengelolaan lahan pertanian.
- Program Pengembangan penanganan pasca panen pertanian;
- Program Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
- Program Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
- Program Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan.
- Program Pencetakan Sawah.
- Program Pencetakan kolam ikan air tawar.
- Program Pembelian dan pendistribuan vaksin ternak.
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan Perikanan.
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan.
- Program Peningkatan Produksi Perkebunan.
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan.

b. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi

Pembangunan perdagangan, industri dan koperasi ke depan menuntut sinergi antara berbagai sektor. Kebijakan pembangunan perdagangan, industri, koperasi, UKM dan investasi direncanakan berdasarkan kompetensi inti lokal sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dan menggerakkan sektor perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pengembangan industri kecil dan rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah keluarga khususnya dan masyarakat umumnya, produk industri yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pegunungan Bintang diantaranya adalah industri pengolahan keripik talas, sirop buah merah, pengolahan kopi bubuk organik dengan menyediakan alat penggiling biji kopi serta kerajinan noken dapat diusahakan oleh masyarakat mengingat ketersediaan bahan baku yang besar serta dapat diterapkan dengan mudah di masyarakat.

Potensi perdagangan di wilayah perbatasan negara RI-PNG dapat dimanfaatkan untuk meningkatan PAD Kabupaten Pegunungan Bintang dengan melakukan igembangan perdagangan di Distrik Batom mengingat aktifitas kedekatan hubungan kultural masyarakat Pegunungan Bintang dengan masyarakat negara tetangga yang sangat erat.

Pengembangan investasi merupakan faktor penting dalam mengelola potensi sumberdaya alam Pegunungan Bintang, mengingat perekonomian tidak akan bergerak tanpa adanya investasi khususnya swasta. Investasi akan menyerap tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhimya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga perlu mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, sehingga potensi investasi di bidang pertambangan bahan galian C (marmer, batu gamping. pasir dll) serta Galian

B (emas, tembaga, batu bara dan Migas dll) diharapkan dapat dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas dalam bidang perdagangan, industri dan koperasi adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM).
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi.
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. **Parawisata**

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pegunungan Bintang dihadapkan pada kendala sumberdaya manusia dan sarana kepariwisataan yang terbatas. Potensi wisata alam (wisata hutan dan sungai) dan prasarana wisata budaya (tari-tarian dan adat istiadat) yang beragam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Program prioritas dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- . Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata .

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah sangatlah penting bagi keberlanjutan pembangunan, mengingat pemerintah daerah dituntut untuk dapat kreatif dalam mencari sumber penerimaan daerah hagi kesejahteraan rakyat. Aset pemerintah daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak juga penting untuk dijaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Sumber-sumber penerimaan (potensi SDA) dan aset daerah perlu dilakukan inventarisir dengan tujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai modal pembangunan.

Program prioritas dalam bidang pendapatan dan pengelolaan asset daerah adalah sebagai berikut :

- Program Penyusunan Regulasi Daerah; Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.
- Program Pengembangan dan Pengamanan Aset Daerah.
- Program Pengembangan Sistem Informasi.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Perhubungan dan Transportasi

Peranan sarana dan prasarana perhubungan sebagai ioda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi

komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan agroindustri pertanian.

Peningkatan aksesbilitas wilayah dalam membuka keterisolasian wilayah terpencil dapat dikembangkan melalui pengembangan transportasi udara, darat dan sungai. Transportasi sungai yang dikembangkan akan diarahkan di bagian utara berawal dari Lerch di Kabupaten Jayapura, melalui sungai Armase melewati wilayah Lerch Aurina (Jayapura) - Teraplu Luban Aboy Okbemtau (Pegunungan Bintang) Pengembangan transportasi sungai di bagian selatan melalui Sungai Digoel di Kawor (Pegunungan Bintang) ke Tanah Merah (Boven Digoel). Pengembangan transportasi sungai di sebelah timur melalui Sungai Sifik.

Pengembangan transportasi udara diarahkan untuk pembangunan bandara baru di Teraplu dan Baser untuk membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan mobilisasi barang, manusia dan jasa di wilayah ini mengingat keterbatasan bandara Oksibil untuk ditingkatkan.

Pengembangan transportasi darat yang diarahkan pada bagian selatan dari Boven Digoel menuju Kawor (Pegunungan Bintang) perlu dilakukan mengingat jalur tersebut sangat penting dan diharapkan menjadi jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten di wilayah Papua. Di bagian utara, dari Jayapura menuju Web (Keerom) - Bias - Mot-Batom - Okyop-Oksamol Pepera dan Oksibil yang merupakan jalan nasional. Dalam wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang guna meningkatkan aksesibilitas wilayah dari Oksibil menuju ibukota distrik akan dikembangkan melalui: (1) Seram Bakon-Okhape - Alemsom; (2) Oksibil- Oksebang - Oksop - Bime; (3) Oksibil - Tarub Marantikin-menuju PNG, (4) Oksibil-Iwor - Walabkubun - Arimbawa menuju Kuken di Tanah Merah Boven Digoel; (5) Kawor Awimbon Dekai di Kabupaten Yahukimo.

Program prioritas dalam bidang perhubungan dan transportasi adalah sebagai berikut:

- Program Perencanaan Pembangunan Jalan, Jembatan, sungai dan lapangan terbang.
- Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan dan Peningkatan Lapangan Terbang dan Pelabuhan Sungai.
- Program Pengembangan Kapasitas SAR.
- Program Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat dan Sungai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wilayah perbatasn mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain: mempunyai dampak bagi kedaulatan negara, merupakan faktor bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak keamanan, regional maupun nasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, Kabupaten Pegununngan Bintang yang berbatasan langsung Negara Papua Nugini, menjadi salah satu beranda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. sebagaimana daerah lainnya, kondisi masyarakat sepanjang kawasan perbatasan Papua, sebagian masih pembinaan masyarakat termajinalkan, kesejahteraan rendah, pembangunan yang masih mengutamakan pada pembangunan fisik, kurang mendapat perhatian aparatur pemerintah daerah maupun pusat.

Sejauh Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang, namun masih banyak sektor-sektor mendapatkan penanganan perhatian dari Pemerintah.

Pada intinya, melakukan pembangunan kawasan perbatasan, seperti Kabupaten Pegunungan Bintang maupun kawasan perbatasan lain Indonesia. Pemerintah harus menggandeng semua pihak untuk turut berpartisipasi (masyarakat setempat para

stakeholder terkait), dan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

B. Rekomendasi

1. Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang luas nyata, dan bertanggung jawab menuju berdasarkan prinsip-prinsip yang dikandung otonomi khusus, perlu dilakukan adaptasi institusi birokrasi pemerintahan dan model pembangunan yang demokratis, aspiratif, berkeadilan serta lebih memihak kepada rakyat. Di samping itu, perlu adanya revitalisasi dan refungsionalisasi aparatur pemerintahan berwawasan budaya dan lingkungan. Pada konteks ini, perlu pula dilakukan adaptasi paradigma pembangunan yang lebih sesuai dengan konteks kebutuhan pembangunan.
2. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan tindakan nyata yang langsung dapat diakses dan dinikmati. Oleh karena itu, perlu meningkatkan varian-varian program aksi yang terakomodasi dalam perencanaan sosial dan perencanaan ekonomi yang lebih spesifik. Nilai-nilai sosial budaya lokal perlu ditransformasikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan terintegrasi dalam kinerja pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kampung hingga kabupaten.
3. Sistem dan prosedur perencanaan pembangunan perlu secara konsisten diadaptasikan sesuai dengan poa anutan paradigma pembangunan yang berioentasi pada pemberdayaan masyarakat menuju kemandiriannya. Oleh karena itu, perlu peningkatkan peran institusi perencana dan pelaksana pembangunan di tingkat Kampung hingga ke tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya reduksi usulan program secara tidak obyektif atau hilangnya usulan program dari

Kampung. diperlukan adanya sistem dokumentasi usulan rencana perencanaan yang dialirkan dari bawah ke atas secara konsisten.

4. Diperlukan adanya penggalangan kemitraan dengan segenap stakeholders guna mencari dan menemukan visi dan misi pembangunan bersama. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya forum kerjasama formal di antara institusi masyarakat yang ada di setiap Kampung, Distrik, hingga kabupaten. Melalui wadah formal tersebut dijalin kerjasama informasi secara terpadu dalam kerangka makro-sektoral dan mikro-spasial.
5. Memulai strategi ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat, di mana pembangunan yang sungguh-sungguh dan nyata-nyata melibatkan masyarakat paling bawah. Oleh karena itu diperlukan adanya semacam rekonstruksi model-arus perencanan yang aplikatif dan fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat di tiap wilayah yang diikuti dengan desentralismi fiskal hingga ke tingkan distrik, diturunkan lagi ke tingkat Kampung atau Kelurahan.
6. Pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisan berarti memerlukan peningkatan peran kemandirian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota menyikapi dan mengakomodani beberapa persyaratan penting memerlukan perhatian serius seperti: peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai prioritas utamanya.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat di sepanjang daerah perbatasan dengan cara lain: di kawasan perbatasan guna memberikan saling pengertian dan saling menghargai antar kelompok etnis, sehingga memudahkan penyelesaian masalah perbatasan yang menyangkut sosial budaya; Meningkatan kemampuan pendidikan masyarakat kawasan perbatasan, melalui formal dan maupun sosialisasi, sehingga mereka dapat memahami

mematuhi segala peraturan lintas batas berlaku. Memberikan pendidikan dan menanamkan rasa nasionalisme pemahaman politik masyarakat wilayah perbatasan melalui implementasi demokrasi, distribusi pendapatan yang adil persatuan kesatuan

8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayah perbatasan melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana melaksanakan pengendalian dan penataan penjabaran penduduk, pembinaan masyarakat melalui pola transmigrasi yang berbasis kelautan perikanan SDM yang ada langsung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. *Pegunungan Bintang Dalam Angka 2015*. Jayapura Sumber Kertas.

Silo, Akbar 2006. *Tinjauan Pengalaman Penerapan Paradigma Pembangunan Pembangunan Daerah di Tanah Papua.* Jayapura: LP2SP Fisip Uncen.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Sunaryadi. 2010. *Strategi Pemberdayaan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Menunjang Pertahanan dan Keamanan* NKRI AAU Journal of Defense Science and Technology, Volume 1, Number 2, 5 October 2010, 52-60.

Internet:

Agus, Uropka. "Pengakuan Eksistensi Manusia Aplim Apom Pegunungan Bintang" Available Online at http:/kukamkon.blogspot.co.id/2015/03/pengakuan-ekstensi-manusia-aplim-apom.html (diakses 18 April 2016)

Laksono, Agung Dwi. 2012. "Pegunungan Bintang, Eksotisme Perbatasan di Pegunungan Tengah Papua", Available online http://healthadvocacy 1.blogspot.co.id/2012/05/pegunungan-bintang-eksotis me-perbatasan.html (diakses 18 April 2016)

Ok News. "Menata Alam Untuk Sebuah Asa". Available online at http://www.oksnews.com/index.php/en/sastra/puisi/30-menata-alam-untuk-s ebuah-asa (diakses 18 April 2016)

Pemerintah Kabupaten pegunungan Bintang. "Sekilas Pegunungan Bintang".Available http://www.pcgbintangkab.go.id/menu/do/sekilas-pegunungan-bintang online (diakses 18 April 2016)

Subekti, Sabar. 2015, "Hidup Serba Mahal di Oksibil Papua". Available online at http://www.satuharapan.com/read-detail/read/hidup-serba-mahal-di-oksibil-p apua (diakses 18 April 2016)